



Katalog BPS: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA MEI 2014



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA MEI 2014



Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Mei 2014

ISSN. 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1410

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: xvi + 104 halaman

Naskah: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan IV (November) tahun 2013, Triwulan I (Februari) dan Triwulan II (Mei) tahun 2014. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, September 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin
NIP. 19560805 197903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	xi
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>), dan Ketidakaktifan	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	22
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	23
3. Partisipasi dalam Dunia Kerja (KILM 1)	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	37

4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal	49
5.	Indikator Pengangguran	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	71
	LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2013 dan 2014.....	26
Tabel 2.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2013 dan 2014.....	30
Tabel 3.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013 dan 2014.....	31
Tabel 4.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2013 dan 2014.....	2
Tabel 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014.....	34
Tabel 6.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2013 dan 2014.....	38
Tabel 7.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014.....	39
Tabel 8.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2013 dan 2014.....	42
Tabel 9.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014.....	46
Tabel 10.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal (juta), 2013 dan 2014.....	50
Tabel 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 dan 2014.....	50
Tabel 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 dan 2014.....	53
Tabel 13.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013 dan 2014.....	57
Tabel 14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2013 dan 2014.....	60
Tabel 15.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014.....	62
Tabel 16.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2013 dan 2014.....	64
Tabel 17.	Indikator Setengah Penganggur, 2013 dan 2014.....	65
Tabel 18.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014.....	67
Tabel 19.	Indikator Ketidakaktifan (persen), 2013 dan 2014.....	68
Tabel 20.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014.....	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari dan Mei 2014.....	27
Grafik 2.	TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014.....	28
Grafik 3.	EPR Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2014	32
Grafik 4.	EPR Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2014.....	32
Grafik 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2014	36
Grafik 6.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2014.....	40
Grafik 7.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014.....	43
Grafik 8..	<i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014	44
Grafik 9.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Mei 2014	48
Grafik 10.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Februari dan Mei 2014	52
Grafik 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Mei 2014	52
Grafik 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014	54
Grafik 13.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Mei 2014	63
Grafik 14.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2014.....	66
Grafik 15.	Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Februari dan Mei 2014	69
Grafik 16.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Mei 2014	73
Grafik 17.	Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Mei 2014.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2013 dan 2014.....	77
Lampiran 2	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2013 dan 2014.....	78
Lampiran 3	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2013 dan 2014	79
Lampiran 4	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2013 dan 2014	80
Lampiran 5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2013 dan 2014.....	81
Lampiran 6	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2013 dan 2014	82
Lampiran 7	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014	83
Lampiran 8	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013 dan 2014.....	84
Lampiran 9	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013 dan 2014.....	86
Lampiran 10	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013 dan 2014.....	87
Lampiran 11	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014.....	88
Lampiran 12	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013 dan 2014	91
Lampiran 13	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2013 dan 2014.....	92
Lampiran 14	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2013 dan 2014.....	93
Lampiran 15	Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014.....	94
Lampiran 16	Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014.....	95
Lampiran 17	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2013 dan 2014	96
Lampiran 18	Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2013 dan 2014.....	97
Lampiran 19	Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014.....	98

Lampiran 20	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2013 dan 2014	99
Lampiran 21	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2013 dan 2014.....	100
Lampiran 22	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2013 dan 2014	101
Lampiran 23	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2013 dan 2014	102
Lampiran 24	Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama.....	103

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 mencapai 126,02 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 700 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (125,32 juta orang) dan naik sebanyak 1,28 juta orang jika dibandingkan keadaan November 2013 (124,74 juta orang).

Persentase TPAK naik tipis dari 69,17 persen pada Februari 2014 menjadi 69,33 persen pada Mei 2014, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Mei 2014 naik sebesar 0,16 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, TPAK Mei 2014 juga naik sebesar 0,25 persen.

Secara nasional, angka EPR pada Mei 2014 mengalami peningkatan tipis jika dibandingkan keadaan Februari 2014, yaitu meningkat sebesar 0,16 poin dari angka 65,23 menjadi 65,39. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Mei 2014. Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, EPR Mei 2014 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,23 poin dari angka 65,16.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Mei 2014

ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan periode sebelumnya (November 2013 dan Februari 2014). Persentase terbesar diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha (47,62 persen; 56,60 juta orang), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (36,78 persen; 43,72 juta orang) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (15,60 persen; 18,54 juta orang). Pada periode Februari 2014-Mei 2014, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen poin, hanya penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga yang mengalami penurunan sebesar 0,59 persen poin.

Hasil Sakernas Mei 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,27 persen, urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 35,10 persen, dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,63 persen.

Pada Mei 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,59 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh

waktu ini mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (22,34 persen), serta mengalami penurunan sebesar 0,39 persen poin jika dibandingkan dengan keadaan November 2013 (22,98 persen). Hasil Sakernas Mei 2014 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,84 persen dan 15,49 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Mei 2014 mencapai 32,32 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2014 (33,47 persen) dan November 2013 (33,36 persen), masing-masing sebesar 1,15 persen poin dan 1,04 persen poin.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, menunjukkan bahwa dari 118,86 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,47 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (63,55 juta orang). Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada November 2013 sebesar 53,77 persen, turun menjadi 53,59 persen pada Februari 2014, dan kembali turun pada Mei 2014 menjadi 53,47 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada November 2013 mencapai 46,23 persen, naik menjadi 46,41

persen pada Februari 2014, dan naik pada Mei 2014 hingga mencapai 46,53 persen.

TPT pada Mei 2014 sebesar 5,68 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Mei 2014, menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami sedikit fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 maupun November 2013. TPT pada Mei 2014 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,02 persen poin bila dibandingkan Februari 2014 (5,70 persen), tetapi naik sebesar 0,01 persen poin dibandingkan November 2013 (5,67 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 18,72 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 19 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 1,67 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Februari 2014 tetapi turun sebesar 0,52 persen poin apabila dibandingkan November 2013

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,21 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,45 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Mei 2014, mencapai 9,65 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 5,71 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,94 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Mei 2014, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,47 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,18 juta orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 30,67 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,67 persen.

Hasil Sakernas November 2013, Februari 2014 dan Mei 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan Februari 2014, tingkat ketidakaktifan pada Mei 2014 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan November 2013 turun sebesar 0,25 persen poin. Sejalan dengan penurunan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Februari 2014 – Mei 2014), jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 100 ribu

orang dari 55,85 juta orang pada Februari 2014 menjadi 55,75 juta orang pada Mei 2014.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Februari 2014. Angkatan kerja pada Mei 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 60,00 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,85 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,90 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,25 persen.

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. BPS sejak Triwulan I Februari 2011

menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–Mei 2014, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Estimasi ketenagakerjaan Februari dan Mei 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk. Sedangkan November 2013 merupakan hasil *backcasting* dari

penimbang Proyeksi Penduduk yang digunakan pada Mei dan Februari 2014.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah

dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja

(KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi

pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang

layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong

penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga

kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel

bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan

ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat

ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

2. PENJELASAN TEKNIS

Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas

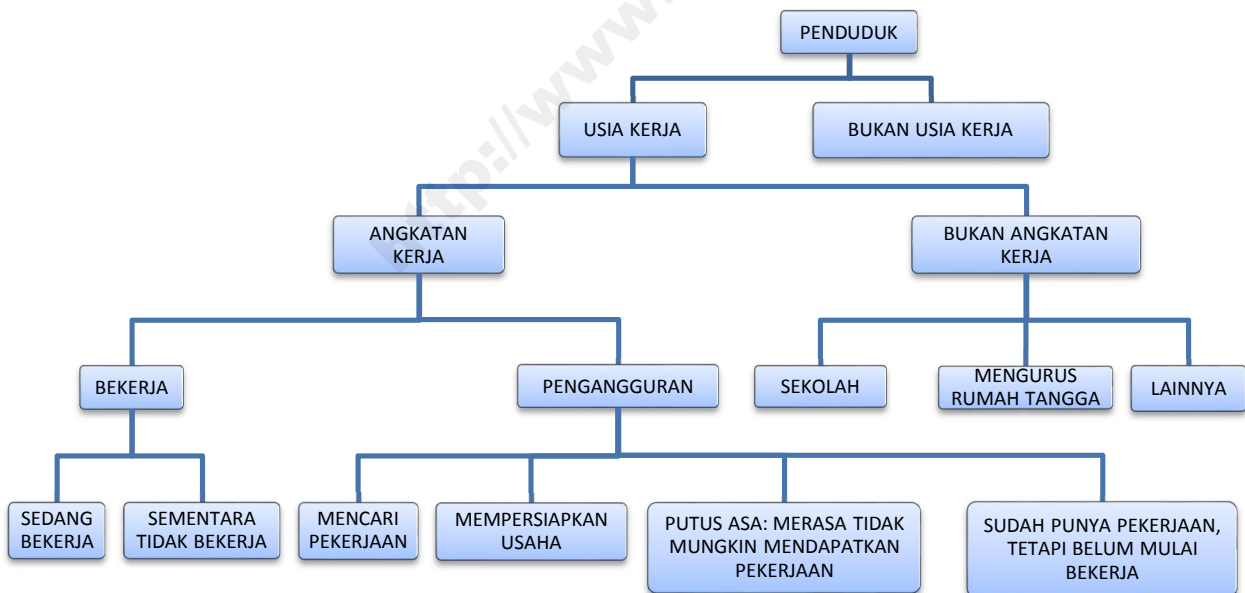
maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, Federasi Rumor,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak

mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu

jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
 6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
 8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (UNDEREMPLOYMENT), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak

memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat

pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (Underemployment)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang

dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.

- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada

pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya

tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh

karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 mencapai 126,02 juta orang. Jumlah tersebut naik sebanyak 700 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (125,32 juta orang) dan naik sebanyak 1,28 juta orang jika dibandingkan keadaan November 2013 (124,74 juta orang), lihat Lampiran 3. Persentase TPAK naik tipis dari 69,17 persen pada Februari 2014 menjadi 69,33 persen pada Mei 2014, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Mei 2014 naik sebesar 0,16 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, TPAK Mei 2014 juga naik sebesar 0,25 persen.

Pada umumnya TPAK laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran ini terlihat pada Mei 2014, TPAK laki-laki mencapai 85,05 persen sementara pada perempuan hanya 53,68 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 85 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja. Pola yang sama juga terjadi pada periode Februari 2014, dimana TPAK laki-laki (85,04 persen)

lebih tinggi dibanding TPAK perempuan (53,37 persen). Begitu pula pada November 2013 TPAK laki-laki (85,30 persen) lebih tinggi dibanding TPAK Perempuan (52,94 persen).

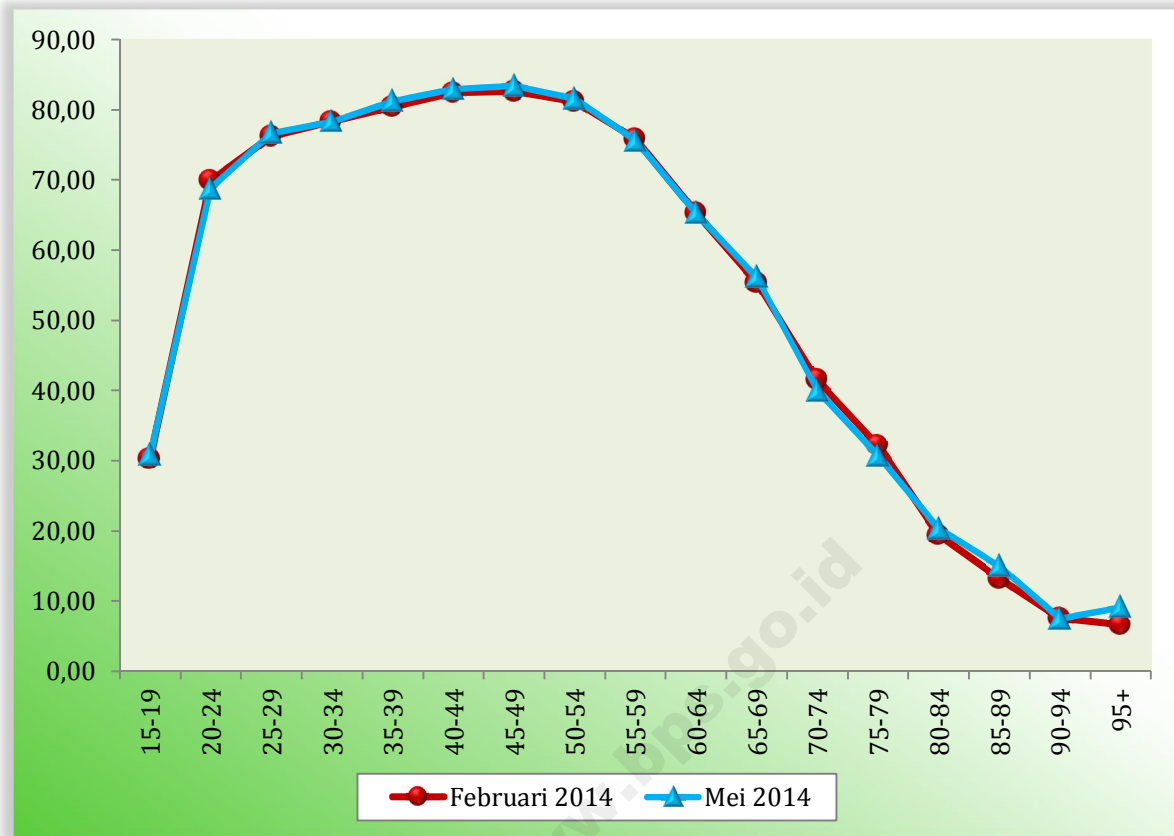
Pada Sakernas periode Februari 2014-Mei 2014 kenaikan persentase TPAK yang terbesar terjadi pada kelompok umur 35-54 tahun yaitu naik sebesar 0,59 persen poin, sedangkan penurunan persentase TPAK yang terbesar terjadi pada kelompok umur 65 tahun ke atas, yang menurun sebesar 0,32 persen poin. Pada periode November 2013-Mei 2014, persentase TPAK mengalami peningkatan hampir pada semua kelompok umur. Untuk kelompok umur yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah kelompok umur 35-54 tahun, yang naik sebesar 0,93 persen poin. Sedangkan untuk kelompok umur yang mengalami penurunan hanya terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun, yaitu turun sebesar 1,01 persen poin (Tabel 1).

Grafik 1 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur 5 tahunan, TPAK terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, namun demikian pergeseran grafik terlihat agak mencolok pada kelompok umur 70-74 tahun sampai dengan kelompok umur 95 tahun ke atas.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2013 dan 2014

Kelompok Umur	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	69,08	69,17	69,33
Laki-laki	85,30	85,04	85,05
Perempuan	52,94	53,37	53,68
Perkotaan	67,36	67,18	67,35
Perdesaan	70,85	71,23	71,37
(15–64)	71,24	71,28	71,46
Laki-laki	87,24	86,92	87,00
Perempuan	55,07	55,45	55,75
Perkotaan	69,66	69,42	69,57
Perdesaan	72,90	73,22	73,44
(15–24)	50,51	49,79	49,50
Laki-laki	61,01	60,47	60,27
Perempuan	39,73	38,83	38,45
Perkotaan	49,91	48,93	48,19
Perdesaan	51,15	50,72	50,91
(25–54)	79,78	79,99	80,42
Laki-laki	98,14	97,86	98,15
Perempuan	61,37	62,06	62,65
Perkotaan	78,66	78,65	79,13
Perdesaan	80,96	81,40	81,78
(25–34)	77,30	77,29	77,49
Laki-laki	97,59	97,32	97,54
Perempuan	57,10	57,36	57,53
Perkotaan	77,55	77,25	77,40
Perdesaan	77,02	77,35	77,59
(35–54)	81,33	81,67	82,26
Laki-laki	98,48	98,21	98,53
Perempuan	64,07	65,03	65,87
Perkotaan	79,38	79,56	80,26
Perdesaan	83,33	83,84	84,30
(55–64)	70,51	71,35	71,17
Laki-laki	86,51	86,48	86,00
Perempuan	54,11	55,82	56,01
Perkotaan	63,88	64,09	64,39
Perdesaan	76,89	78,32	77,64
65 Tahun ke atas	40,35	41,02	40,70
Laki-laki	56,22	56,71	55,56
Perempuan	27,51	28,37	28,65
Perkotaan	32,01	32,65	33,14
Perdesaan	47,00	47,75	46,80

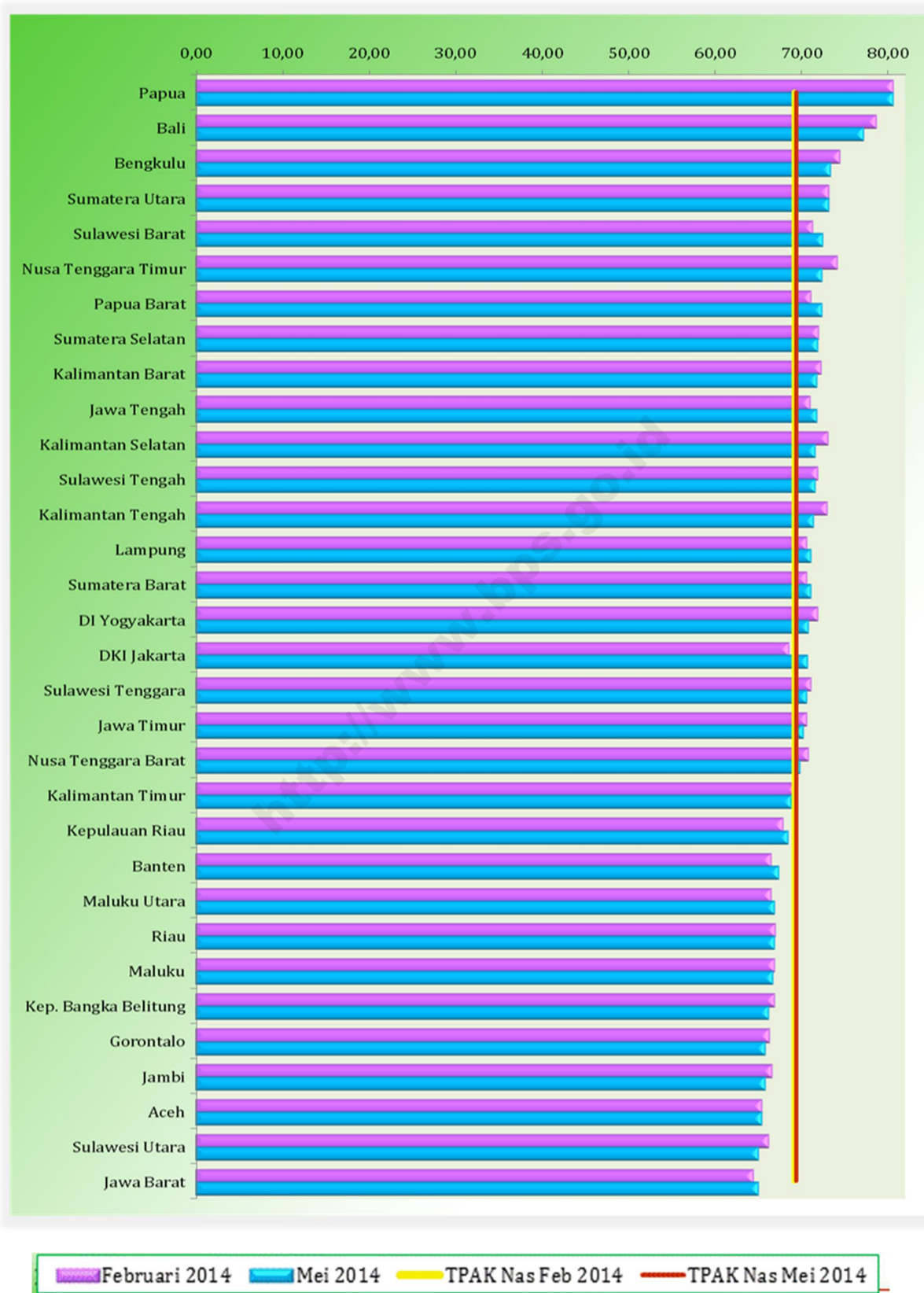
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari dan Mei 2014



TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Mei 2014 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (80,58), Provinsi Bali (77,07) dan Provinsi Bengkulu (73,24). Kedudukan TPAK Tersebut jauh di atas TPAK Nasional yang hanya sebesar 69,33 persen. Jika dibandingkan keadaan Februari 2014 kedudukan provinsi tersebut tidak berubah dimana Provinsi Papua, Propinsi Bali dan Propinsi Bengkulu juga menduduki tiga besar provinsi dengan TPAK tertinggi.

Sedangkan untuk provinsi dengan TPAK terendah pada Mei 2014 ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (63,32 persen), Provinsi Jawa Barat (64,94 persen), dan Provinsi Sulawesi Utara (64,98 persen). Tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah hampir sama jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, dimana posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (62,02 persen), Provinsi Jawa Barat (64,36 persen) dan Provinsi Aceh (65,32 persen). (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014



4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

Pada Tabel 3, secara nasional angka EPR pada Mei 2014 mengalami peningkatan tipis jika dibandingkan keadaan Februari 2014, yaitu meningkat sebesar 0,16 poin dari angka 65,23 menjadi 65,39. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Mei 2014. Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, EPR Mei 2014 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,23 poin dari angka 65,16.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, EPR laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan EPR perempuan baik pada periode November 2013, Februari 2014, maupun Mei 2014. EPR laki-laki pada periode Mei 2014 sebesar 80,34 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,08 poin jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014. EPR perempuan pada Mei 2014 sebesar 50,52 mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin dibandingkan keadaan Februari 2014.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, EPR daerah perkotaan periode

Februari-Mei 2014 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,21 poin sedangkan untuk wilayah perdesaan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,12 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15-24 tahun), pada periode Februari-Mei 2014 menurun sebesar 1,07 poin dari 41,30 menjadi 40,23. Begitu pula pada periode November 2013-Mei 2014 EPR penduduk kelompok umur muda juga mengalami penurunan yaitu sebesar 0,56 poin dari 40,79.

Pada periode Februari 2014-Mei 2014 penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun ke atas), mengalami peningkatan EPR sebesar 0,56 poin, yaitu dari angka 72,80 pada Februari 2014 naik menjadi 73,36 pada Mei 2014. Periode November 2013-Mei 2014 EPR pada kelompok umur dewasa juga mengalami peningkatan, yaitu meningkat sebesar 0,48 poin dari angka 72,88 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta),
2013 dan 2014

Kelompok Umur	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke atas	180,57	181,17	181,77
Laki-laki	90,08	90,38	90,68
Perempuan	90,49	90,79	91,09
Perkotaan	91,62	91,96	92,30
Perdesaan	88,95	89,21	89,47
Umur Muda (15–24)	43,43	43,58	43,73
Laki-laki	22,00	22,08	22,15
Perempuan	21,43	21,50	21,58
Perkotaan	22,48	22,57	22,65
Perdesaan	20,95	21,01	21,08
Umur Dewasa (25+)	137,14	137,59	138,04
Laki-laki	68,08	68,30	68,53
Perempuan	69,07	69,29	69,51
Perkotaan	69,14	69,39	69,64
Perdesaan	68,01	68,20	68,40
Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja	117,67	118,17	118,86
Laki-laki	72,73	72,54	72,85
Perempuan	44,93	45,63	46,01
Perkotaan	57,40	57,47	57,88
Perdesaan	60,27	60,70	60,98
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	17,72	18,00	17,59
Laki-laki	10,97	11,03	10,81
Perempuan	6,74	6,97	6,78
Perkotaan	8,78	8,92	8,66
Perdesaan	8,93	9,07	8,93
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	99,95	100,17	101,27
Laki-laki	61,76	61,51	62,04
Perempuan	38,19	38,66	39,23
Perkotaan	48,62	48,55	49,22
Perdesaan	51,33	51,62	52,05

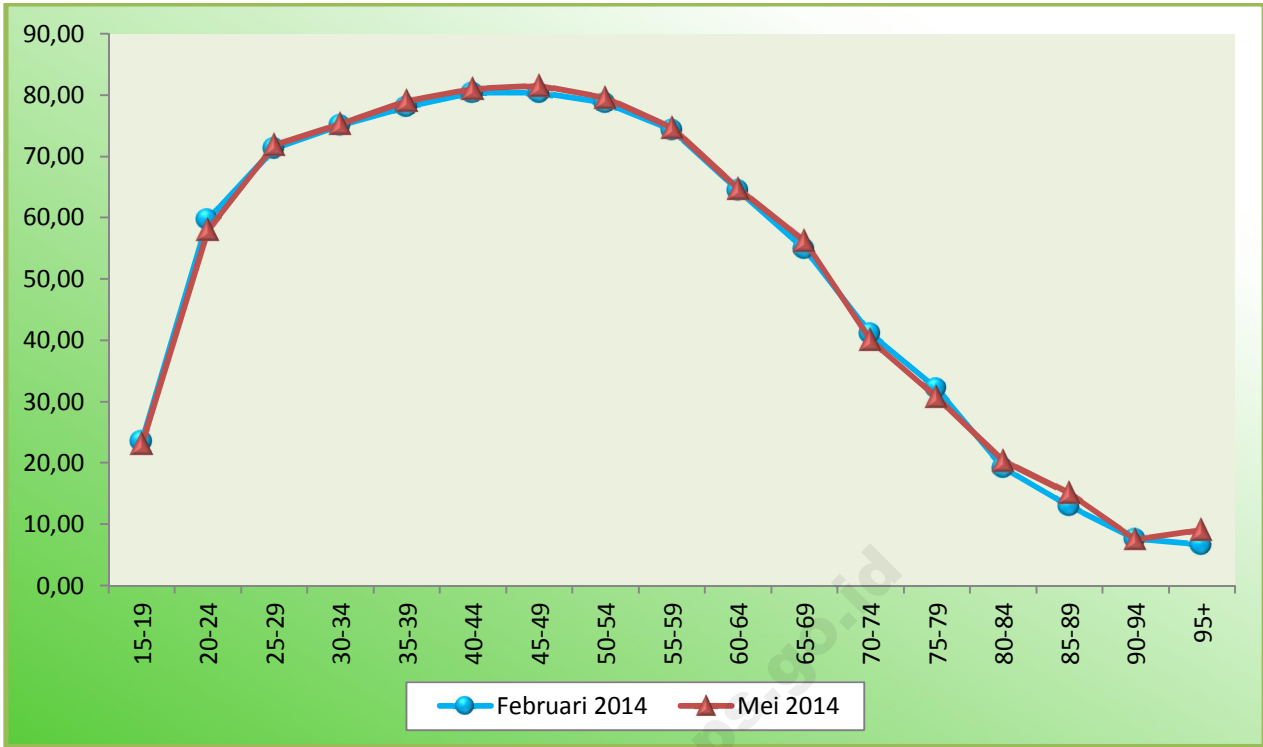
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013 dan 2014

Kelompok Umur	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	65,16	65,23	65,39
Laki-laki	80,74	80,26	80,34
Perempuan	49,65	50,26	50,52
Perkotaan	62,65	62,50	62,71
Perdesaan	67,75	68,04	68,16
Umur Muda (15–24)	40,79	41,30	40,23
Laki-laki	49,87	49,94	48,79
Perempuan	31,47	32,43	31,45
Perkotaan	39,06	39,55	38,24
Perdesaan	42,65	43,18	42,38
Umur Dewasa (25+)	72,88	72,80	73,36
Laki-laki	90,72	90,06	90,54
Perempuan	55,29	55,79	56,43
Perkotaan	70,32	69,96	70,67
Perdesaan	75,48	75,69	76,11

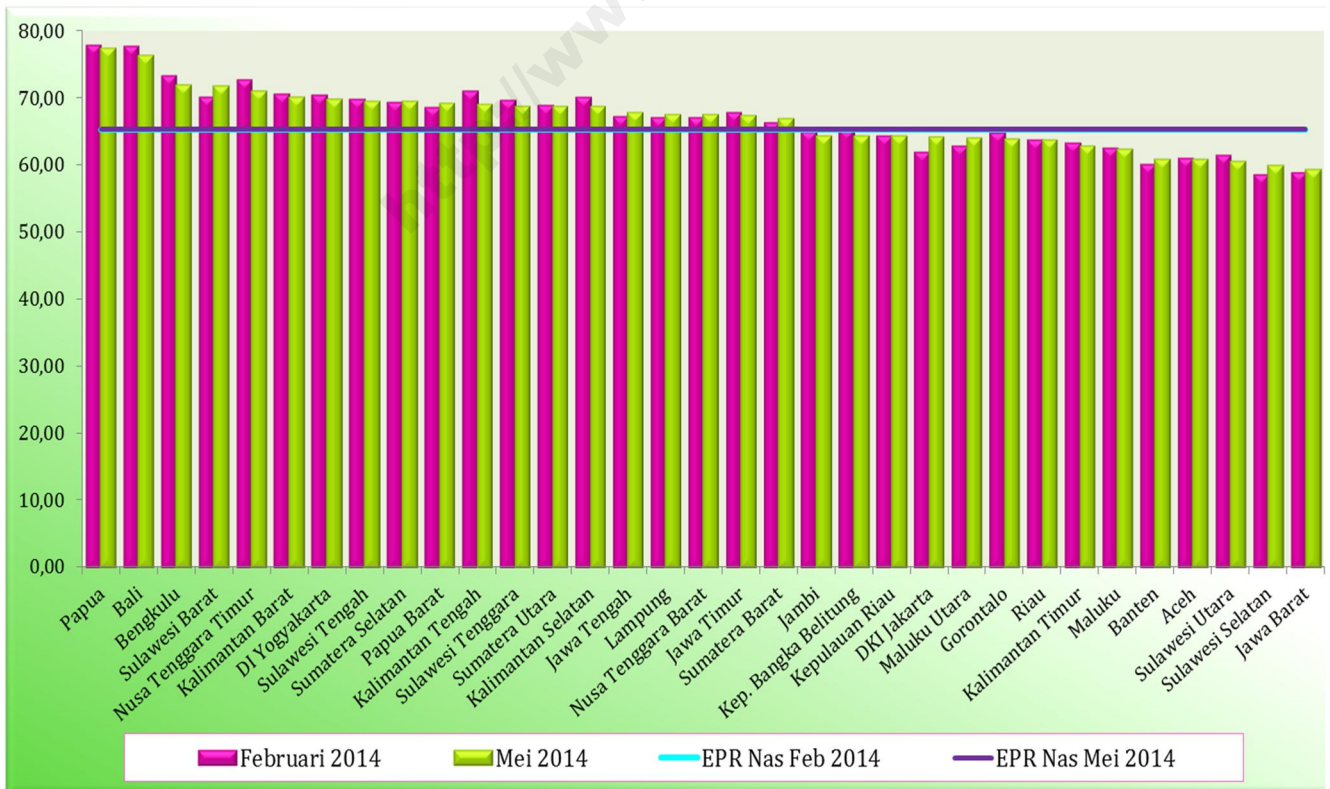
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 1. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR untuk Sakernas Mei 2014 ini berada pada kelompok umur 45-49 tahun dengan EPR 81,54. Grafik EPR periode Februari 2014 dan Mei 2014 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, namun pada kelompok umur 80-84 tahun sampai dengan kelompok umur 95 tahun ke

atas grafik terlihat bergeser. Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Mei 2014, yaitu Provinsi Papua (77,33), Bali (76,22), dan Bengkulu (71,77). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Jawa Barat (59,24), Sulawesi Selatan (59,81), Sulawesi Utara (60,38). Ketiga provinsi dengan EPR terendah ini berada jauh dari nilai EPR rata-rata nasional yaitu 65,39.

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2014



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2014



4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Mei 2014 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan periode sebelumnya (November 2013 dan Februari 2014). Berdasarkan Tabel 4 dan 5, persentase terbesar diduduki oleh penduduk bekerja dengan status berusaha (47,62 persen; 56,60 juta orang), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (36,78 persen; 43,72 juta orang) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (15,60 persen; 18,54 juta orang).

Pada Tabel 5, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen poin untuk periode Februari 2014-Mei 2014, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen poin, hanya penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga yang mengalami penurunan sebesar 0,59 persen poin.

Jika dibandingkan dengan periode November 2013-Mei 2014, penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan tipis sebesar 0,03 persen poin, buruh/karyawan/pegawai meningkat sebesar 0,27

persen, dan pekerja keluarga menurun sebesar 0,24 persen.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada Mei 2014 mencapai 59,75 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 60 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, maupun November 2013 persentase pekerja rentan terus mengalami penurunan masing masing menurun sebesar 0,06 persen poin dan 0,25 persen poin.

Keadaan pekerja rentan menurut jenis kelamin pada November 2013, Februari 2014 maupun Mei 2014 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, sebagai fakta pada Mei 2014 ini persentase pekerja rentan perempuan sebesar 65,33 persen dan pekerja rentan laki-laki sebesar 56,22 persen.

Provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Mei 2014, yaitu Provinsi Papua (82,35 persen), Nusa Tenggara Timur (79,45 persen), dan Nusa Tenggara Barat (76,10 persen). Jika dibandingkan dengan Februari 2014 persentase terbesar pekerja rentan masih terdapat pada ketiga provinsi tersebut, hanya persentasenya saja yang berubah dimana

Provinsi Papua sebesar 82,03 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 75,31 (Grafik 5).
Tenggara Timur sebesar 81,35 persen, dan Nusa

Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2013 dan 2014

Status Pekerjaan Utama	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	117,67	118,17	118,86
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	42,96	43,35	43,72
Berusaha	56,07	55,69	56,60
Pengusaha	4,11	4,14	4,12
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	39,86	40,06	40,35
Pekerja bebas	12,10	11,49	12,13
Pekerja keluarga	18,64	19,13	18,54
Pekerja rentan*)	70,60	70,68	71,02
Laki-laki	72,73	72,54	72,85
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	28,04	28,19	28,55
Berusaha	39,90	39,42	39,57
Pengusaha	3,36	3,38	3,34
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	27,15	27,25	27,22
Pekerja bebas	9,39	8,79	9,01
Pekerja keluarga	4,79	4,93	4,73
Pekerja rentan*)	41,34	40,97	40,96
Perempuan	44,93	45,63	46,01
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	14,92	15,16	15,17
Berusaha	16,17	16,27	17,03
Pengusaha	0,75	0,77	0,78
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	12,71	12,80	13,13
Pekerja bebas	2,71	2,70	3,12
Pekerja keluarga	13,84	14,20	13,81
Pekerja rentan*)	29,26	29,71	30,06

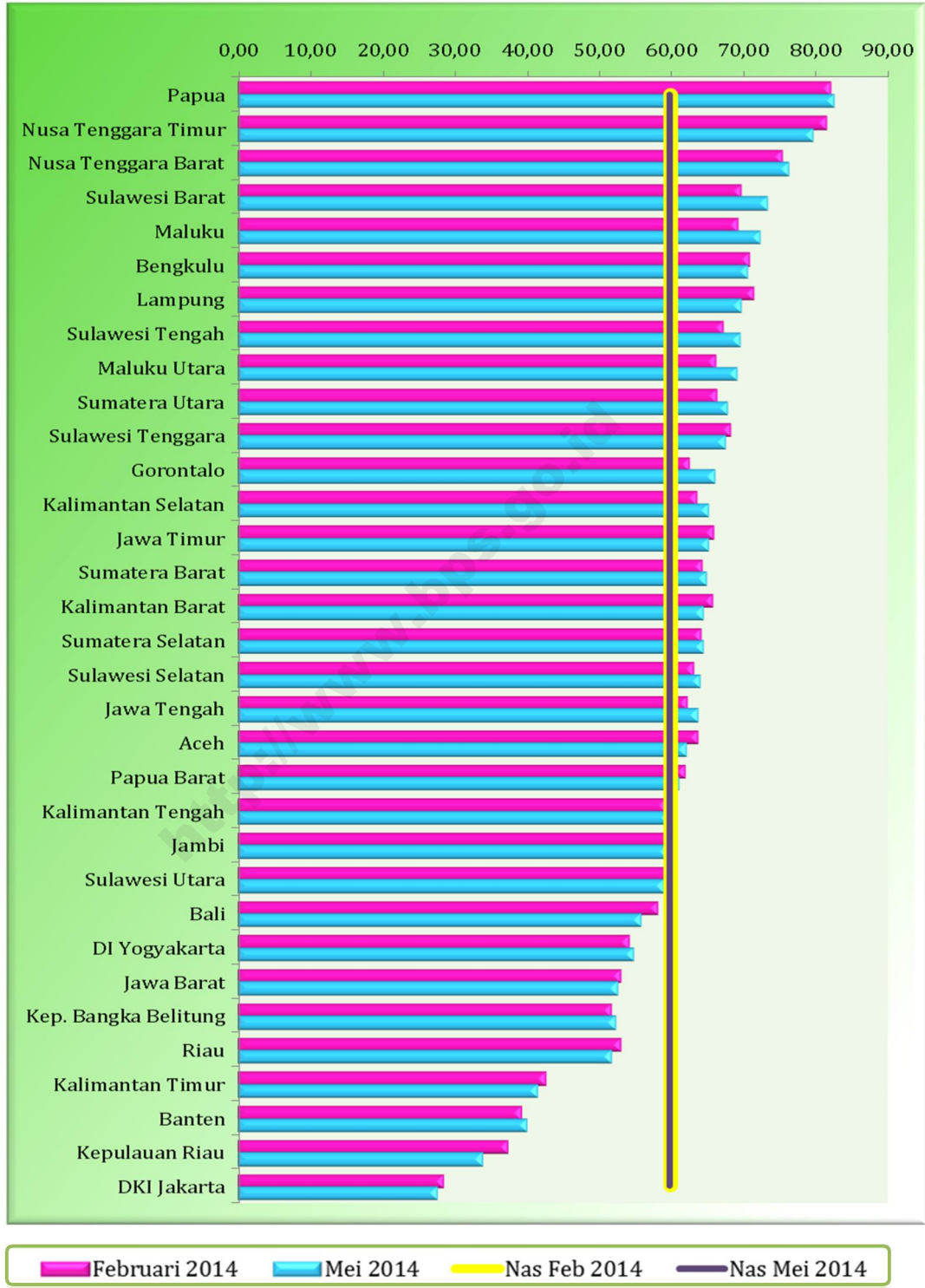
Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014

Status Pekerjaan Utama	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,51	36,68	36,78
Berusaha	47,65	47,13	47,62
Pengusaha	3,49	3,51	3,47
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	33,88	33,90	33,95
Pekerja bebas	10,28	9,72	10,20
Pekerja keluarga	15,84	16,19	15,60
Pekerja rentan*)	60,00	59,81	59,75
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,55	38,87	39,19
Berusaha	54,86	54,34	54,32
Pengusaha	4,62	4,65	4,59
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	37,33	37,57	37,37
Pekerja bebas	12,91	12,12	12,36
Pekerja keluarga	6,59	6,79	6,49
Pekerja rentan*)	56,83	56,48	56,22
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	33,20	33,21	32,97
Berusaha	35,99	35,66	37,01
Pengusaha	1,67	1,69	1,70
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	28,29	28,05	28,53
Pekerja bebas	6,03	5,92	6,78
Pekerja keluarga	30,81	31,13	30,02
Pekerja rentan*)	65,13	65,10	65,33

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2014



4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Pada Tabel 6 dan 7, hasil Sakernas Mei 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,27 persen (52,62 juta orang), urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 35,10 persen (41,72 juta orang), dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,63 persen (24,52 juta orang).

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan sebesar 21,71 persen dan sektor jasa kemasyarakatan 15,64 persen. Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri dan sektor bangunan dengan persentase masing-masing sebesar 12,91 persen dan 6,22 persen.

Periode Sakernas Februari-Mei 2014 menunjukkan sedikit perubahan, dimana sektor jasa-jasa turun sebesar 0,41 persen poin, sektor manufaktur juga mengalami penurunan tipis sebesar 0,13 persen poin sedangkan sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen poin.

Pada periode Sakernas November 2013–Mei 2014, sektor jasa-jasa dan sektor pertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,26 persen poin dan 0,47 persen poin sedangkan sektor manufaktur mengalami penurunan sebesar 0,73 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas Mei 2014 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (74,29 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Bangka Belitung (32,34 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (79,25 persen).

Kondisi ini tidak mengalami perubahan di mana pada periode Februari persentase tertinggi sektor pertanian masih berada di Provinsi Papua yang mencapai 73,43 persen. Provinsi DKI Jakarta dengan persentase penduduk tertinggi penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa yang mencapai 78,35 persen. Hanya sektor manufaktur yang mengalami perubahan dimana posisi tertinggi diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (31,38 persen), lihat Lampiran 9.

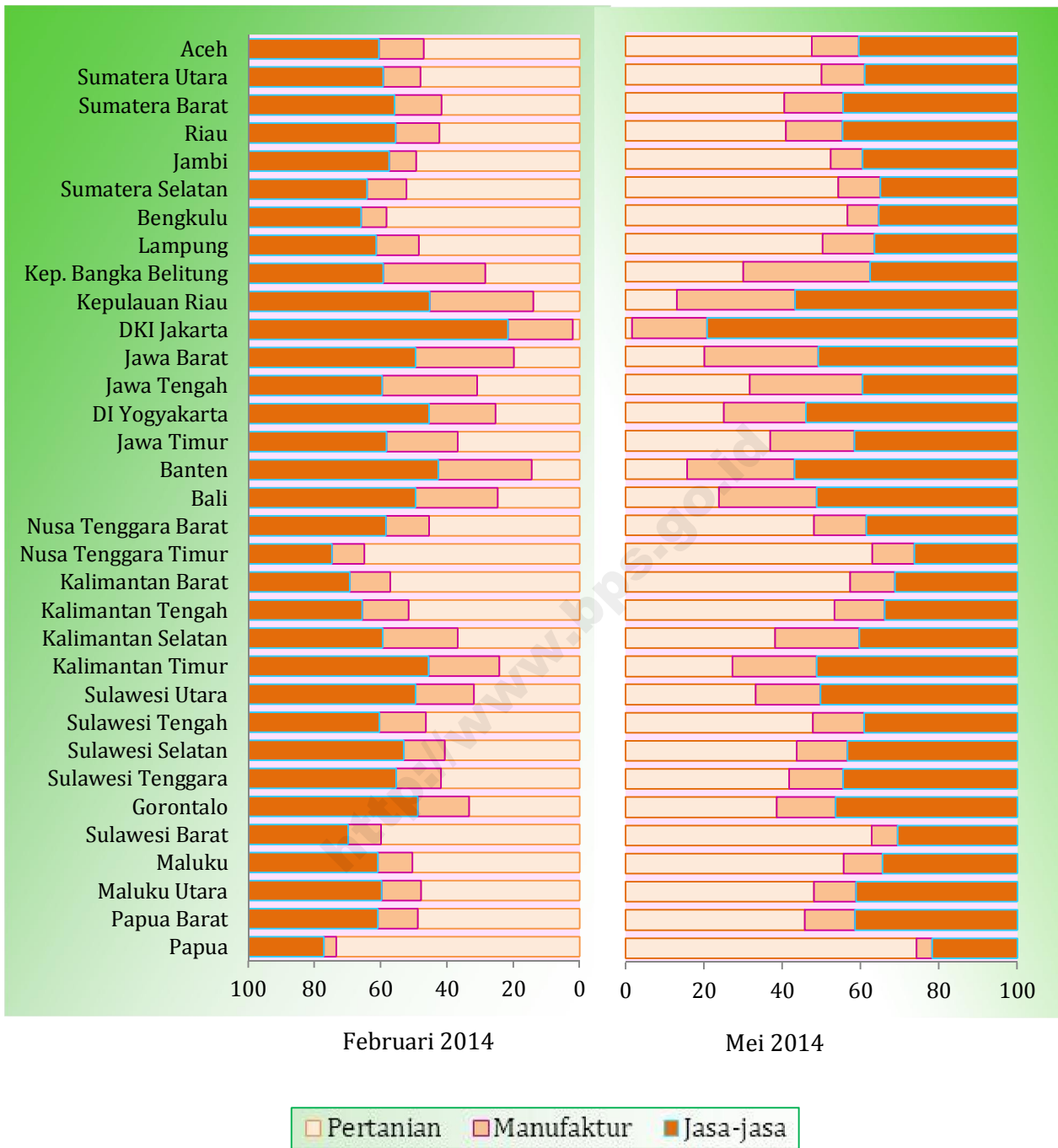
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (juta), 2013 dan 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	117,67	118,17	118,86
Pertanian	40,75	40,83	41,72
Manufaktur	25,14	24,54	24,52
Pertambangan	1,65	1,63	1,51
Industri	15,52	15,39	15,34
Listrik, Gas dan Air	0,28	0,31	0,27
Bangunan	7,69	7,21	7,40
Jasa-jasa	51,78	52,80	52,62
Perdagangan	25,32	25,81	25,81
Transportasi	5,03	5,32	4,99
Keuangan	3,15	3,19	3,23
Jasa Kemasyarakatan	18,28	18,48	18,59
Laki-laki	72,73	72,54	72,86
Pertanian	25,48	25,38	25,76
Manufaktur	18,42	17,94	17,99
Pertambangan	1,47	1,45	1,37
Industri	9,18	9,17	9,14
Listrik, Gas dan Air	0,25	0,28	0,24
Bangunan	7,52	7,04	7,24
Jasa-jasa	28,83	29,22	29,11
Perdagangan	11,98	12,10	12,16
Transportasi	4,73	4,95	4,71
Keuangan	2,23	2,27	2,29
Jasa Kemasyarakatan	9,89	9,90	9,95
Perempuan	44,93	45,63	46,02
Pertanian	15,27	15,46	15,97
Manufaktur	6,71	6,59	6,53
Pertambangan	0,17	0,17	0,14
Industri	6,33	6,23	6,20
Listrik, Gas dan Air	0,03	0,03	0,03
Bangunan	0,18	0,17	0,16
Jasa-jasa	22,95	23,58	23,52
Perdagangan	13,34	13,71	13,65
Transportasi	0,30	0,37	0,28
Keuangan	0,92	0,92	0,94
Jasa Kemasyarakatan	8,39	8,58	8,65

Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,63	34,56	35,10
Manufaktur	21,36	20,76	20,63
Pertambangan	1,40	1,38	1,27
Industri	13,18	13,02	12,91
Listrik, Gas dan Air	0,24	0,26	0,23
Bangunan	6,54	6,10	6,22
Jasa-jasa	44,01	44,68	44,27
Perdagangan	21,52	21,84	21,71
Transportasi	4,28	4,50	4,20
Keuangan	2,67	2,70	2,72
Jasa Kemasyarakatan	15,54	15,64	15,64
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,03	34,99	35,36
Manufaktur	25,33	24,73	24,69
Pertambangan	2,03	2,00	1,88
Industri	12,63	12,63	12,55
Listrik, Gas dan Air	0,34	0,39	0,33
Bangunan	10,33	9,71	9,93
Jasa-jasa	39,64	40,28	39,95
Perdagangan	16,48	16,68	16,70
Transportasi	6,50	6,83	6,46
Keuangan	3,06	3,13	3,14
Jasa Kemasyarakatan	13,60	13,64	13,65
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Pertanian	33,98	33,87	34,70
Manufaktur	14,94	14,45	14,20
Pertambangan	0,38	0,38	0,31
Industri	14,09	13,64	13,47
Listrik, Gas dan Air	0,08	0,06	0,06
Bangunan	0,39	0,37	0,36
Jasa-jasa	51,08	51,68	51,10
Perdagangan	29,69	30,04	29,65
Transportasi	0,67	0,81	0,62
Keuangan	2,04	2,02	2,04
Jasa Kemasyarakatan	18,68	18,81	18,79

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2014



4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Pada Mei 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,59 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 23 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 (22,34 persen), serta mengalami penurunan sebesar 0,39 persen poin jika dibandingkan dengan keadaan November 2013 (22,98 persen). Hasil Sakernas Mei 2014 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,84 persen dan 15,49 persen (Tabel 8).

Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, tingkat pekerja paruh waktu

perempuan pada Mei 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,82 persen poin (dari 33,02 persen menjadi 33,84 persen). Berbeda halnya dengan pekerja paruh waktu laki-laki yang mengalami penurunan 0,14 persen poin (dari 15,63 persen menjadi 15,49 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, selama periode yang sama, tingkat pekerja paruh waktu pada Mei 2014 mengalami peningkatan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,39 persen poin dan 0,14 persen poin.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan keadaan November 2013 penurunan terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu di daerah perdesaan maupun perkotaan. Penurunan juga terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Mei 2014 (Grafik 7; Lampiran 10), tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (44,86 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Jambi (36,87 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (36,64 persen). Begitu pula pada periode Sakernas Februari 2014, provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi juga diduduki oleh ketiga provinsi tersebut, hanya saja Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di posisi kedua dan Provinsi Jambi di posisi ketiga.

Untuk provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah pada Mei 2014 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (9,53 persen), Kepulauan Riau (14,67 persen) dan Banten (15,21 persen). Ketiga provinsi ini juga menjadi provinsi

dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada periode Sakernas Februari 2014, hanya saja Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau (Grafik 7; Lampiran 10).

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2013 dan 2014

Indikator	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	22,98	22,34	22,59
Laki-laki	16,13	15,63	15,49
Perempuan	34,07	33,02	33,84
Perkotaan	15,36	14,75	15,14
Perdesaan	30,25	29,53	29,67
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	56,61	57,06	57,98

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas Mei 2014 mencapai 57,98 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 58 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Mei 2014 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 maupun November 2013, dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,92 persen poin dan 1,37 persen poin (Tabel 8).

Grafik 8 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi pada Mei 2014 terdapat

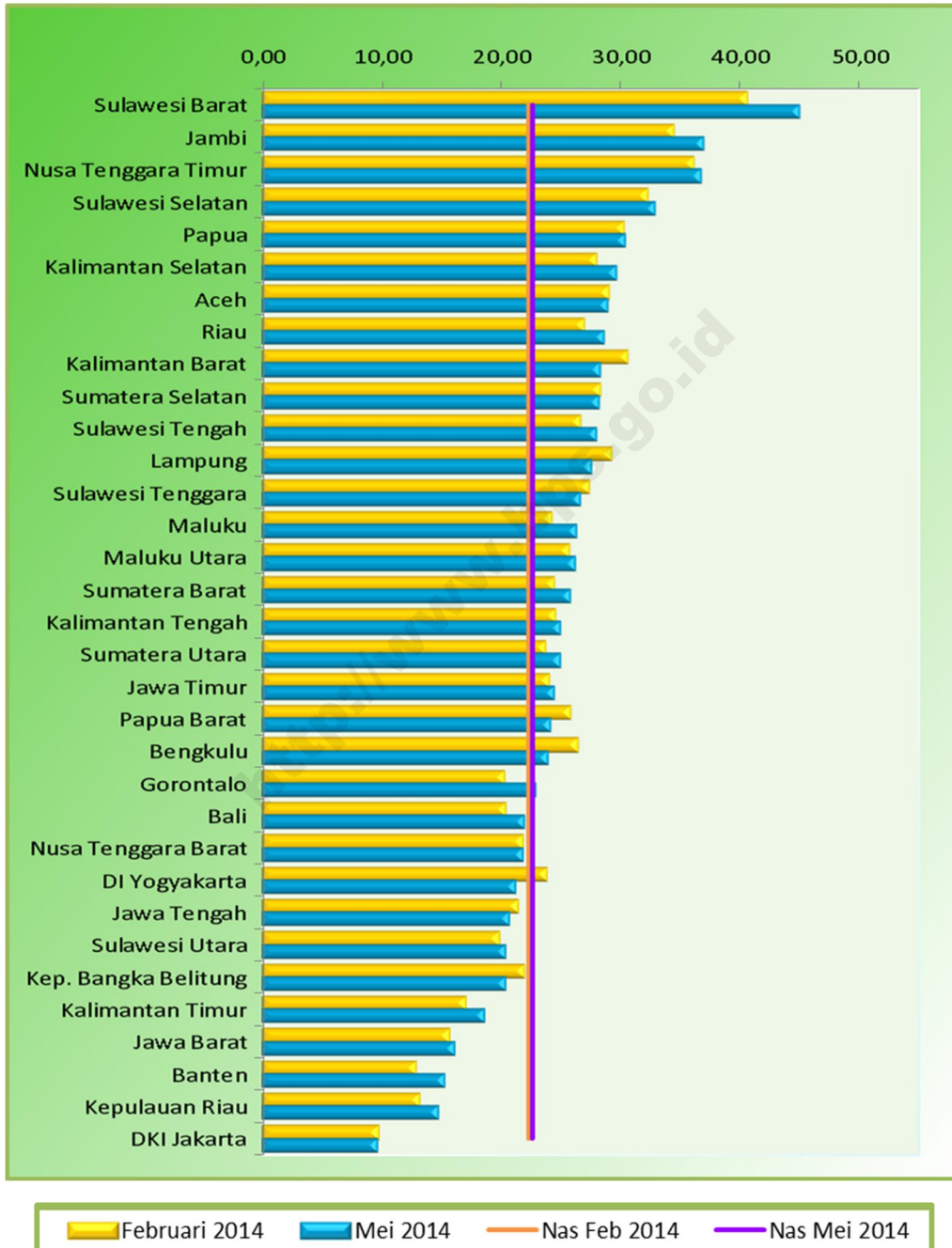
di Provinsi Maluku Utara (65,11 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (63,67 persen) dan Provinsi DKI Jakarta (62,80 persen). Sedangkan pada periode Sakernas Februari 2014, provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Maluku Utara (62,71 persen), Provinsi Sulawesi Tengah (61,34 persen), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (61,04 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 44,56 persen, Provinsi Jambi sebesar 47,22 persen, dan Provinsi Riau sebesar 49,85 persen. Sedangkan pada periode

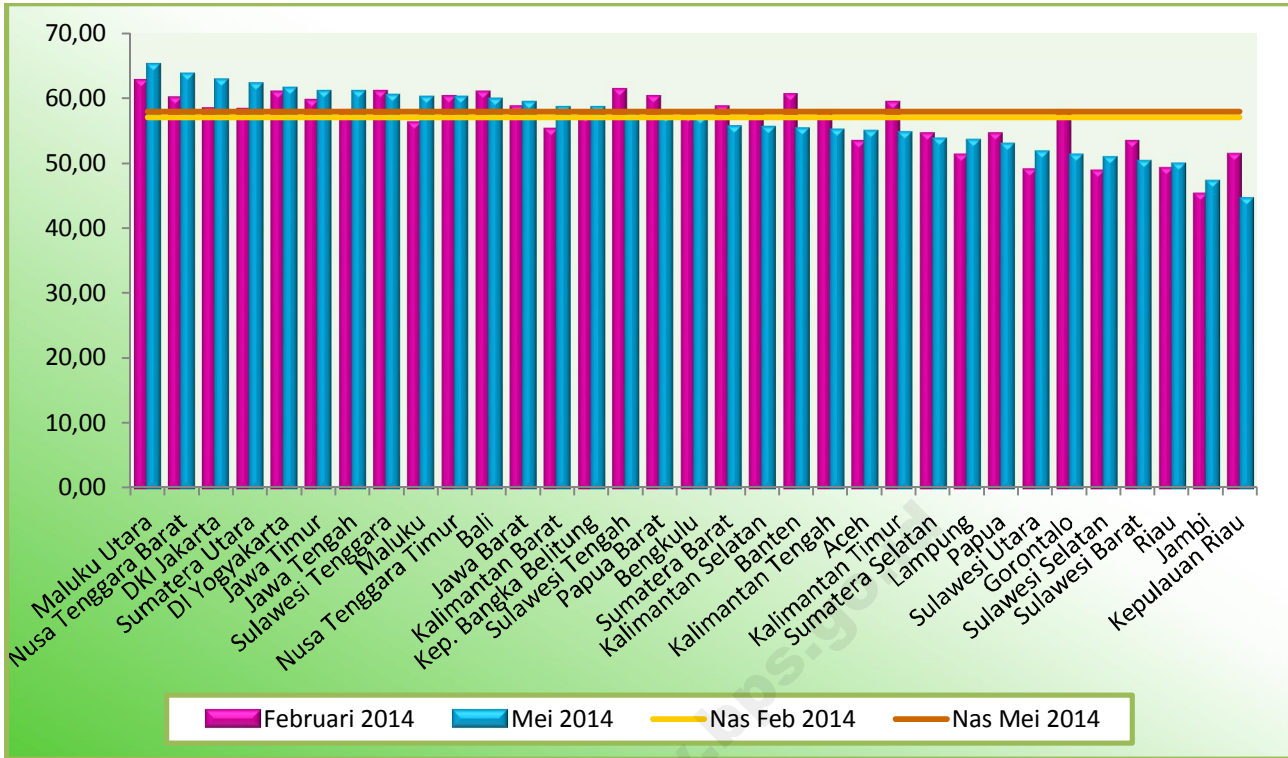
Sakernas Februari 2014, provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah diduduki oleh Provinsi Jambi (45,20 persen),

Provinsi Sulawesi Selatan (48,75 persen), dan Provinsi Sulawesi Utara (48,96 persen)

Grafik 7. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014



Grafik 8. . Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014



4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Mei 2014 mencapai 32,32 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2014 (33,47 persen) dan November 2013 (33,36 persen), masing-masing sebesar 1,15 persen poin dan 1,04 persen poin.

Dapat dicermati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode November 2013, Februari 2014, dan Mei 2014 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Seperti yang terjadi pada Mei 2014, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 43,97 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 24,97 persen.

Apabila kita amati, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada November 2013, Februari

2014, maupun Mei 2014. Hasil Sakernas Mei 2014 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 41,90 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 22,23 persen.

Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 30,84 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 26,87 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Mei 2014, persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 22,25 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 29,79 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014

Jumlah Jam Kerja	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,89	2,19	1,61
1–14 jam	5,93	6,16	5,87
15–24 jam	12,15	11,67	11,22
25–34 jam	13,39	13,45	13,62
35–39 jam	10,19	10,09	9,97
40–48 jam	31,00	30,38	30,84
49–59 jam	14,58	14,93	15,58
60 jam ke atas	10,87	11,13	11,29
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,96	2,33	1,65
1–14 jam	3,56	3,85	3,50
15–24 jam	9,19	8,44	7,96
25–34 jam	11,85	12,10	11,86
35–39 jam	9,68	9,55	9,46
40–48 jam	35,52	34,82	35,78
49–59 jam	17,10	17,42	18,15
60 jam ke atas	11,14	11,49	11,64
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,76	1,97	1,56
1–14 jam	9,77	9,83	9,64
15–24 jam	16,94	16,81	16,37
25–34 jam	15,87	15,61	16,40
35–39 jam	11,03	10,94	10,77
40–48 jam	23,69	23,31	23,01
49–59 jam	10,52	10,98	11,52
60 jam ke atas	10,42	10,55	10,73

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014 (lanjutan)

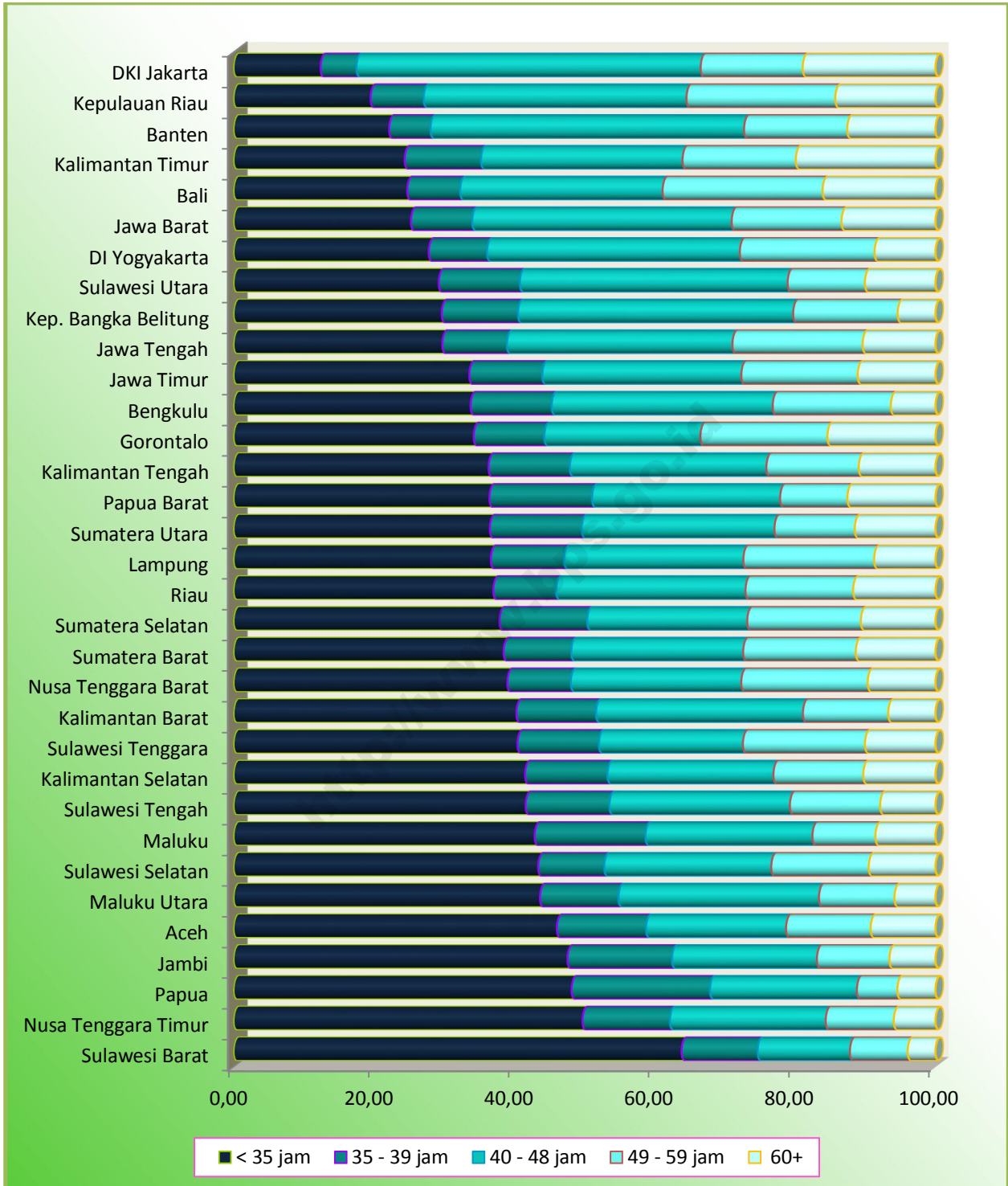
Jumlah Jam Kerja	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	1,68	2,30	1,60
1–14 jam	4,02	4,19	4,08
15–24 jam	7,60	7,27	7,13
25–34 jam	9,49	9,40	9,42
35–39 jam	8,74	8,47	8,31
40–48 jam	38,77	37,68	37,90
49–59 jam	15,37	16,14	16,56
60 jam ke atas	14,33	14,56	15,01
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	2,08	2,09	1,63
1–14 jam	7,76	8,02	7,58
15–24 jam	16,48	15,84	15,10
25–34 jam	17,09	17,30	17,59
35–39 jam	11,57	11,62	11,55
40–48 jam	23,61	23,46	24,13
49–59 jam	13,84	13,79	14,66
60 jam ke atas	7,57	7,88	7,76

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Berdasarkan Sakernas Mei 2014 seperti yang terlihat pada Grafik 9, menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (63,83 persen), Nusa

Tenggara Timur (49,72 persen), dan Papua (48,16 persen). Sedangkan sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (12,39 persen), Kepulauan Riau (19,52 persen), dan Banten (22,17 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Mei 2014



4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 pada Tabel 10 dan Tabel 11, menunjukkan bahwa dari 118,86 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,47 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (63,55 juta orang).

Berdasarkan hasil Sakernas pada periode November 2013, Februari 2014, dan Mei 2014 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai

dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada November 2013 sebesar 53,77 persen, turun menjadi 53,59 persen pada Februari 2014, dan kembali turun pada Mei 2014 menjadi 53,47 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada November 2013 mencapai 46,23 persen, naik menjadi 46,41 persen pada Februari 2014, dan naik pada Mei 2014 hingga mencapai 46,53 persen (Tabel 11).

Pada Mei 2014, berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yaitu mencapai 65,23 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada November 2013 dan Februari 2014 masing-masing mencapai 65,47 persen dan 64,94 persen.

Sedangkan pada kelompok perempuan, dari total 46,01 juta orang yang bekerja terdapat sebanyak 26,78 juta orang (58,21 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 19,23 juta orang (41,79 persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal (juta), 2013 dan 2014

Kategori Sektor	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	117,67	118,17	118,86
Laki-laki	72,73	72,54	72,85
Perempuan	44,93	45,63	46,01
Perkotaan	57,40	57,47	57,87
Perdesaan	60,27	60,70	60,99
Formal	54,40	54,84	55,31
Laki-laki	35,62	35,61	36,08
Perempuan	18,78	19,23	19,23
Perkotaan	36,23	36,47	36,69
Perdesaan	18,17	18,37	18,62
Informal	63,27	63,33	63,55
Laki-laki	37,12	36,93	36,77
Perempuan	26,15	26,40	26,78
Perkotaan	21,17	21,00	21,18
Perdesaan	42,10	42,33	42,37

Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013 dan 2014

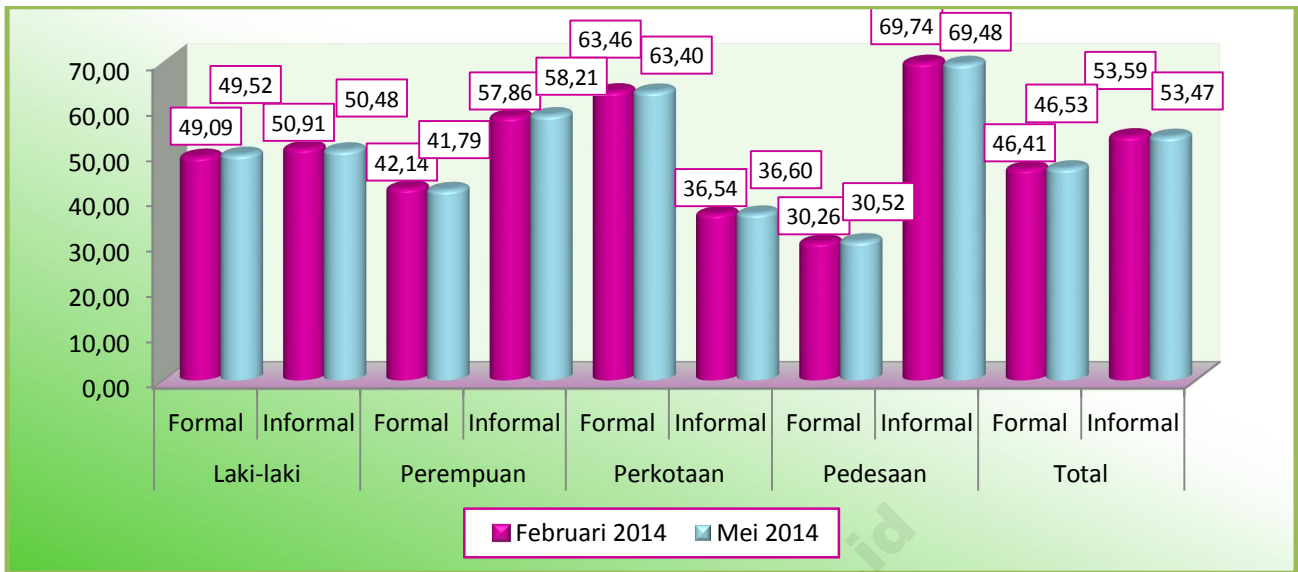
Kategori Sektor	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Formal+Informal	100,00	100,00	100,00
Formal	46,23	46,41	46,53
Informal	53,77	53,59	53,47
Formal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	65,47	64,94	65,23
Perempuan	34,53	35,06	34,77
Perkotaan	66,60	66,50	66,34
Perdesaan	33,40	33,50	33,66
Informal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	58,66	58,31	57,86
Perempuan	41,34	41,69	42,14
Perkotaan	33,46	33,16	33,33
Perdesaan	66,54	66,84	66,67

Berdasarkan Sakernas Mei 2014 pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pada penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 66,34 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014 yang mencapai 66,50 persen (turun 0,16 persen poin), begitu pula bila dibandingkan November 2013 juga mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin. Sementara itu, di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, dan mengalami penurunan bila dibanding keadaan Februari 2014, yaitu dari 66,84 persen pada Februari 2014 turun menjadi 66,67 persen pada Mei 2014.

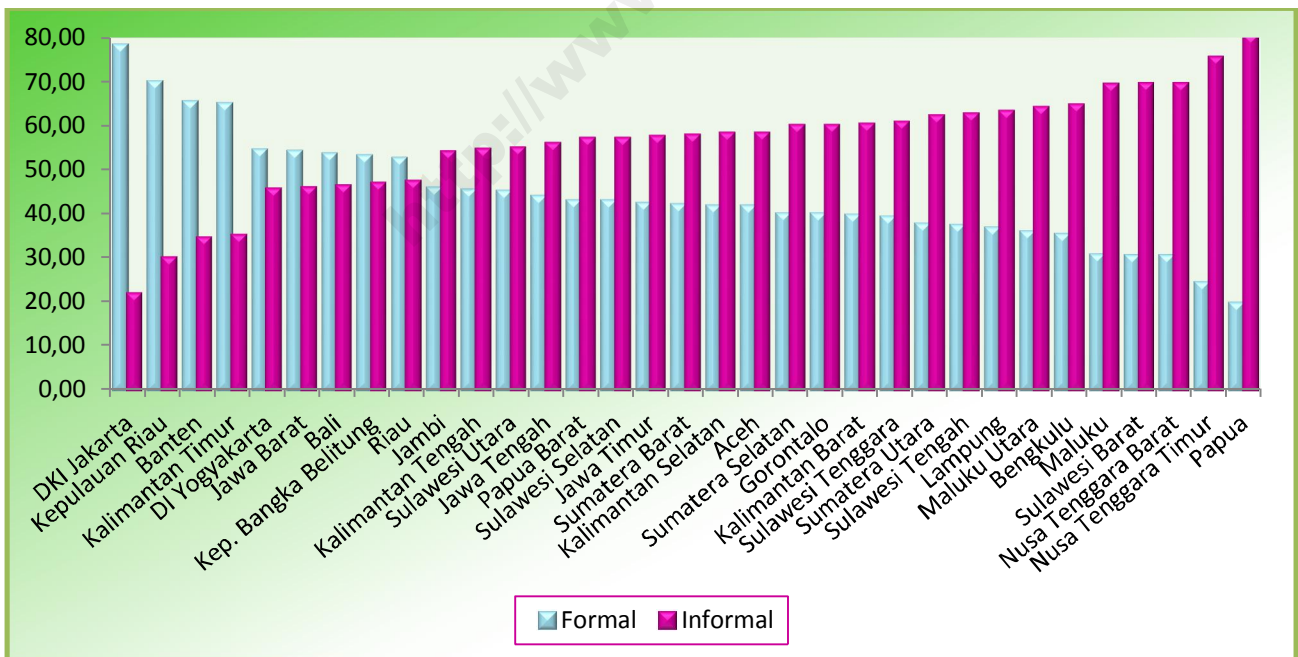
Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang

mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (78,14 persen), Kepulauan Riau (69,93 persen), Banten (65,41 persen), dan DI Yogyakarta (54,34 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (64,87 persen). Sementara itu di sisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (80,35 persen), Nusa Tenggara Timur (75,62 persen), Nusa Tenggara Barat (69,57 persen), Sulawesi Barat (69,53 persen), dan Maluku (69,45 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, Februari dan Mei 2014



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Mei 2014



5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Pada Tabel 12, TPT pada Mei 2014 sebesar 5,68 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Mei 2014, menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami sedikit fluktuasi bila dibandingkan

dengan keadaan Februari 2014 maupun November 2013. Seperti yang terlihat pada Tabel 12, TPT pada Mei 2014 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,02 persen poin bila dibandingkan Februari 2014 (5,70 persen), tetapi naik sebesar 0,01 persen poin dibandingkan November 2013 (5,67 persen).

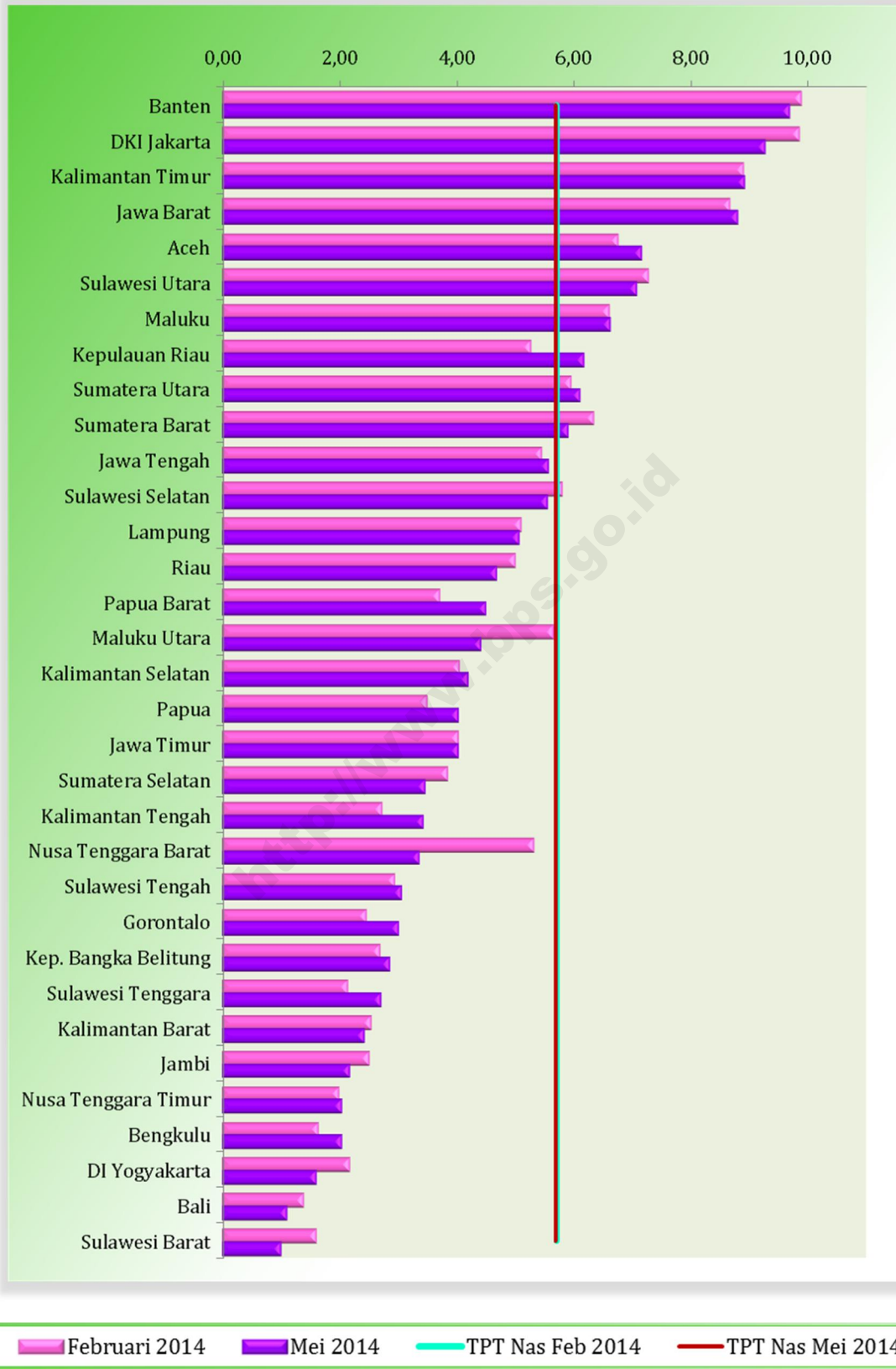
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2013 dan 2014

TPT	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,67	5,70	5,68
Laki-laki	5,34	5,62	5,54
Perempuan	6,21	5,84	5,90
Perkotaan	7,00	6,97	6,89
Perdesaan	4,38	4,48	4,50

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT pada periode Mei 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014 hanya terjadi pada kelompok laki-laki yang turun sebesar 0,08 persen poin, sedangkan pada kelompok perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, penurunan terjadi di daerah perkotaan sebesar 0,08 persen

poin, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin. Sementara itu, seiring kenaikan TPT secara nasional pada Mei 2014 bila dibandingkan dengan November 2013, kenaikan hanya terjadi pada kelompok laki-laki sebesar 0,20 persen poin, sedangkan berdasarkan wilayah tempat tinggal hanya terjadi kenaikan pada wilayah perdesaan sebesar 0,12 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Februari dan Mei 2014



Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten (9,67 persen), Provinsi DKI Jakarta (9,26 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (8,91 persen). Ketiga provinsi tersebut juga menjadi provinsi dengan TPT tertinggi pada Februari 2014. Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Mei 2014 diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT sebesar 0,98 persen, kemudian posisi kedua diduduki

oleh Provinsi Bali dengan TPT 1,09 persen, dan posisi ketiga diduduki Provinsi DI Yogyakarta dengan TPT sebesar 1,59 persen. Sementara itu, tiga provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Februari 2014 diduduki oleh Provinsi Bali (1,37 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (1,60 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi Bengkulu (1,62 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 12.

<http://www.bps.go.id>

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 18,72 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 19 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 1,67 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas Februari tetapi turun sebesar 0,52 persen poin apabila dibandingkan November 2013 (Tabel 13). Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada November 2013, TPT penduduk umur muda pada perempuan cenderung lebih tinggi

daripada laki-laki. Namun sebaliknya pada tahun 2014, baik Februari maupun Mei TPT penduduk umur muda laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada laki-laki umur 15-24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada perempuan di umur yang sama.

Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Mei 2014 mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Februari 2014). Peningkatan TPT pada kelompok perempuan lebih tinggi daripada kelompok laki-laki. TPT umur muda perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,72 persen poin, sedangkan laki-laki sebesar 1,64 persen poin.

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Mei 2014, TPT daerah perkotaan mencapai 20,65 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 16,75 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 21 orang yang

menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 17 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Mei 2014 sebesar 6,30 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda enam kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan peningkatan TPT umur muda pada Mei 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami

peningkatan sebesar 1,17 poin. Lain halnya jika dibandingkan dengan November 2013 rasio tersebut terlihat turun sebesar 0,63 poin. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan seperti ditunjukkan berdasarkan hasil Sakernas baik November 2013 maupun dua triwulan di tahun 2014.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013 dan 2014

Indikator	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Umur Muda (%)	19,24	17,05	18,72
Laki-laki	18,27	17,40	19,04
Perempuan	20,77	16,49	18,21
Perkotaan	21,74	19,18	20,65
Perdesaan	16,62	14,85	16,75
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	6,93	5,13	6,30
Laki-laki	7,02	5,54	7,03
Perempuan	6,79	4,56	5,37
Perkotaan	5,84	4,45	5,22
Perdesaan	8,90	6,23	8,29
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)	59,65	51,76	56,63
Laki-laki	59,78	53,78	59,53
Perempuan	59,47	48,68	52,33
Perkotaan	56,50	49,20	52,63
Perdesaan	64,59	55,64	62,59
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)	9,72	8,49	9,27
Laki-laki	11,15	10,52	11,48
Perempuan	8,25	6,40	7,00
Perkotaan	10,85	9,38	9,95
Perdesaan	8,50	7,53	8,53

Sementara apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan baik pada November 2013, Februari 2014, maupun Mei 2014. *Share* penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 cukup tinggi yaitu 56,63 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Februari 2014, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 57 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Seperti yang terlihat pada Tabel 13, angka ini mengalami penurunan sebesar 3,02 persen poin bila dibandingkan

dengan November 2013 (59,65 persen), akan tetapi naik sebesar 4,87 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2014 (51,76 persen).

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Mei 2014 sebesar 9,27 persen atau naik dari angka Februari 2014 yang sebesar 8,49 persen. *Share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda sebesar 9,27 persen ini dapat diartikan bahwa pada Mei 2014 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 9 orang diantaranya menganggur.

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,21 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,45 persen (Tabel 14).

Seiring dengan penurunan TPT nasional periode Mei 2014 dibandingkan dengan Februari 2014, penurunan TPT menurut tingkat pendidikan juga terjadi pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan tidak pernah sekolah dengan penurunan masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,08 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah tinggi dengan peningkatan masing-masing sebesar 0,03 persen poin dan 0,19 persen poin bila dibandingkan dengan periode yang sama.

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT pada tingkat pendidikan sekolah menengah periode Mei 2014 dibandingkan dengan Februari 2014 tampak lebih tinggi terjadi pada kelompok laki-laki yang turun sebesar 0,32 persen poin, sedangkan pada perempuan turun 0,03 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa pada tingkat pendidikan dan periode yang sama, terjadi penurunan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan masing-masing sebesar 0,23 persen poin dan 0,18 persen poin.

Tabel 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2013 dan 2014

Tingkat Pendidikan	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	5,67	5,70	5,68
Tidak Pernah Sekolah	1,78	2,53	2,45
Laki-laki	2,58	3,07	4,22
Perempuan	1,17	2,13	1,19
Perkotaan	4,19	5,66	3,24
Perdesaan	1,13	1,65	2,24
Sekolah Dasar	4,67	4,91	4,94
Laki-laki	4,45	4,87	4,78
Perempuan	5,02	4,98	5,21
Perkotaan	6,26	6,63	6,65
Perdesaan	3,64	3,82	3,86
Sekolah Menengah	8,63	8,42	8,21
Laki-laki	7,60	7,82	7,50
Perempuan	10,77	9,66	9,63
Perkotaan	8,58	8,40	8,17
Perdesaan	8,74	8,45	8,27
Sekolah Tinggi	5,72	4,72	4,91
Laki-laki	5,13	4,41	4,81
Perempuan	6,37	5,07	5,02
Perkotaan	5,93	4,81	5,06
Perdesaan	5,05	4,45	4,45

Secara keseluruhan pada periode Mei 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, penurunan TPT terbesar terdapat pada mereka yang tidak pernah sekolah yang tinggal di wilayah perkotaan dengan penurunan sebesar 2,42 persen poin. Pada Februari 2014, TPT pada kelompok ini sebesar 5,66 persen, sedangkan pada Mei 2014 menurun menjadi 3,24 persen.

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan

seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas baik pada November 2013, maupun Februari dan Mei 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur terbanyak pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Seperti pada Mei 2014, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 52,25 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen poin jika dibandingkan Februari 2014 (51,47 persen), dan naik sebesar 2,92 persen poin bila dibandingkan dengan November 2013 (49,33 persen).

Selama periode Februari – Mei 2014, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan tidak pernah sekolah dengan penurunan masing-masing sebesar 0,99 persen poin dan 0,05 persen poin. Penurunan persentase penganggur pada tingkat sekolah menengah terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. Akan tetapi pada penganggur tidak pernah sekolah penurunan hanya terjadi di daerah perkotaan, dan hanya pada perempuan.

Mengamati lebih lanjut Tabel 15, baik pada keadaan November 2013, Februari 2014, maupun Mei 2014, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Mei 2014, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 10,31

persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 7,37 persen.

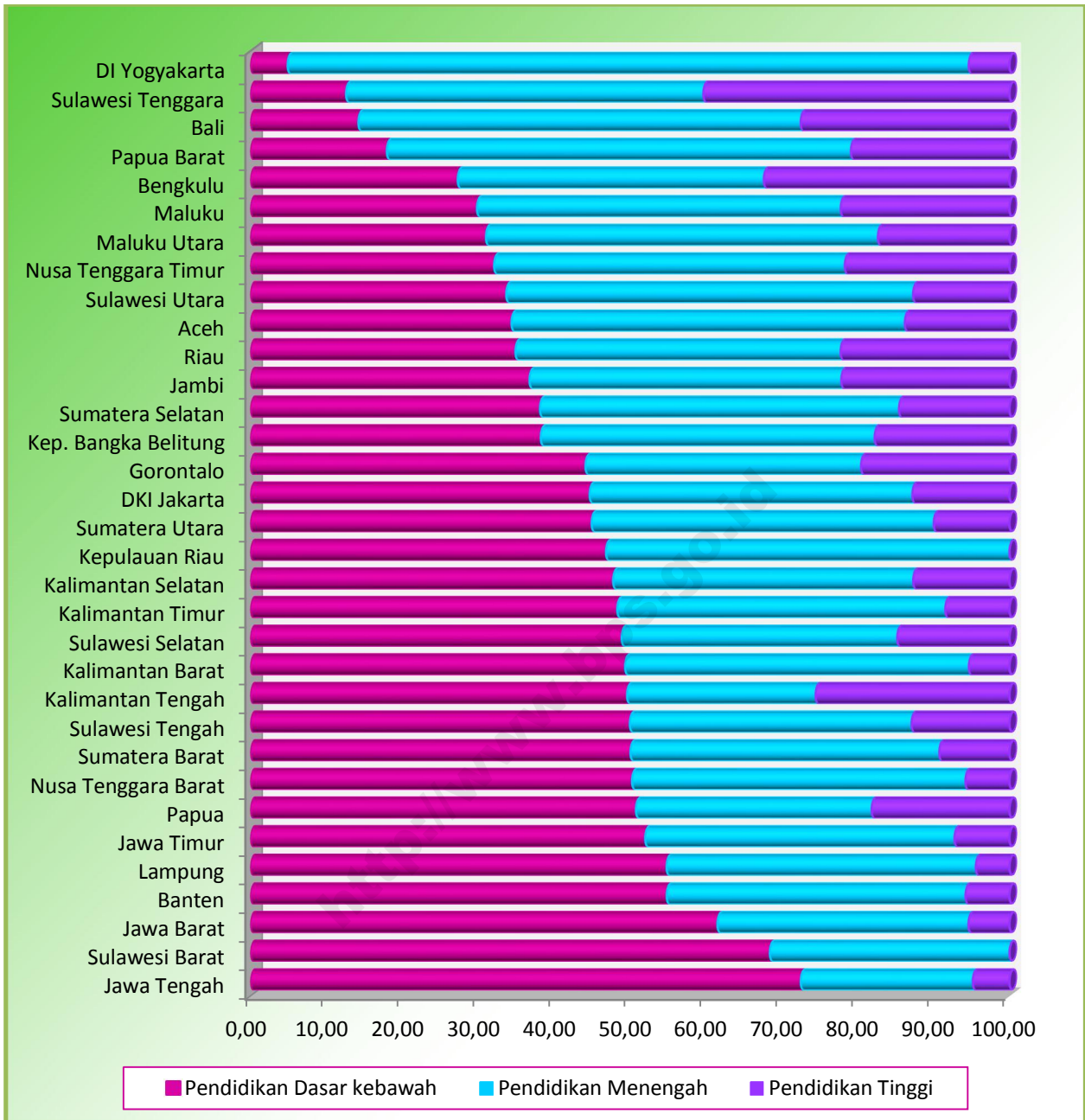
Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Mei 2014, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 15, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 3,30 persen dan 62,03 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 0,85 persen dan 45,68 persen.

Grafik 13 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada Mei 2014, yaitu Provinsi Jawa Tengah (72,51 persen), disusul oleh Provinsi Sulawesi Barat (68,44 persen), dan Provinsi Jawa Barat (61,53 persen) berada pada urutan ketiga. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (40,32 persen), Provinsi Bengkulu (32,36 persen) dan Provinsi Bali (27,50 persen).

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014

Tingkat Pendidikan	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,35	1,88	1,83
Laki-laki	1,47	1,59	2,21
Perempuan	1,19	2,31	1,29
Perkotaan	1,11	1,53	0,85
Perdesaan	1,73	2,40	3,30
Sekolah Dasar	49,33	51,47	52,25
Laki-laki	50,19	51,88	52,02
Perempuan	48,13	50,84	52,58
Perkotaan	42,47	44,75	45,68
Perdesaan	60,05	61,64	62,03
Sekolah Menengah	39,38	38,35	37,36
Laki-laki	40,27	39,74	38,40
Perempuan	38,16	36,23	35,82
Perkotaan	43,55	43,14	42,32
Perdesaan	32,86	31,09	29,97
Sekolah Tinggi	9,94	8,30	8,56
Laki-laki	8,07	6,79	7,37
Perempuan	12,52	10,62	10,31
Perkotaan	12,87	10,58	11,15
Perdesaan	5,36	4,87	4,70

Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Mei 2014



5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Mei 2014, mencapai 9,65 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 5,71 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya

sebanyak 3,94 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Mei 2014, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,47 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,18 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2013 dan 2014

Setengah Penganggur	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	9,98	10,57	9,65
Laki-laki	6,16	6,35	5,71
Perempuan	3,82	4,22	3,94
Perkotaan	3,30	3,51	3,18
Perdesaan	6,68	7,06	6,47

Pada periode Sakernas Februari 2014 dibandingkan dengan hasil Sakernas Mei 2014 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 920 ribu orang. Penurunan angka secara nasional ini diikuti penurunan jumlah setengah penganggur pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang masing-masing turun sebanyak 640 ribu orang dan 280 ribu orang. Penurunan jumlah setengah penganggur juga terjadi baik di wilayah

perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing turun sejumlah 330 ribu orang dan 590 ribu orang.

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Mei 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Februari 2014, maupun November 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 17 berikut ini.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Mei 2014 sebesar 7,66 persen atau turun 0,77 persen poin bila dibanding Februari 2014 (8,43 persen), dan turun 0,34 persen poin bila dibanding November 2013 (8,00 persen). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik pada

November 2013 maupun Februari dan Mei 2014, dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2013 dan 2014

Indikator	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	8,00	8,43	7,66
Laki-laki	8,02	8,27	7,40
Perempuan	7,98	8,70	8,06
Perkotaan	5,35	5,68	5,11
Perdesaan	10,60	11,11	10,13
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	8,48	8,94	8,12
Laki-laki	8,47	8,76	7,83
Perempuan	8,51	9,23	8,57
Perkotaan	5,76	6,10	5,49
Perdesaan	11,08	11,63	10,61

Bila November 2013 menjadi acuan maka persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terlihat berfluktuatif (meningkat pada bulan Februari 2014 dan kembali turun pada Mei 2014). Pada November 2013, dari 100 orang penduduk bekerja sekitar 8 orang diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Februari 2014 meningkat menjadi sekitar 9 orang setengah penganggur dari 100 orang penduduk bekerja. Akan tetapi pada Mei 2014 kembali menjadi sekita 8 orang setengah penganggur dari 100 orang penduduk bekerja.

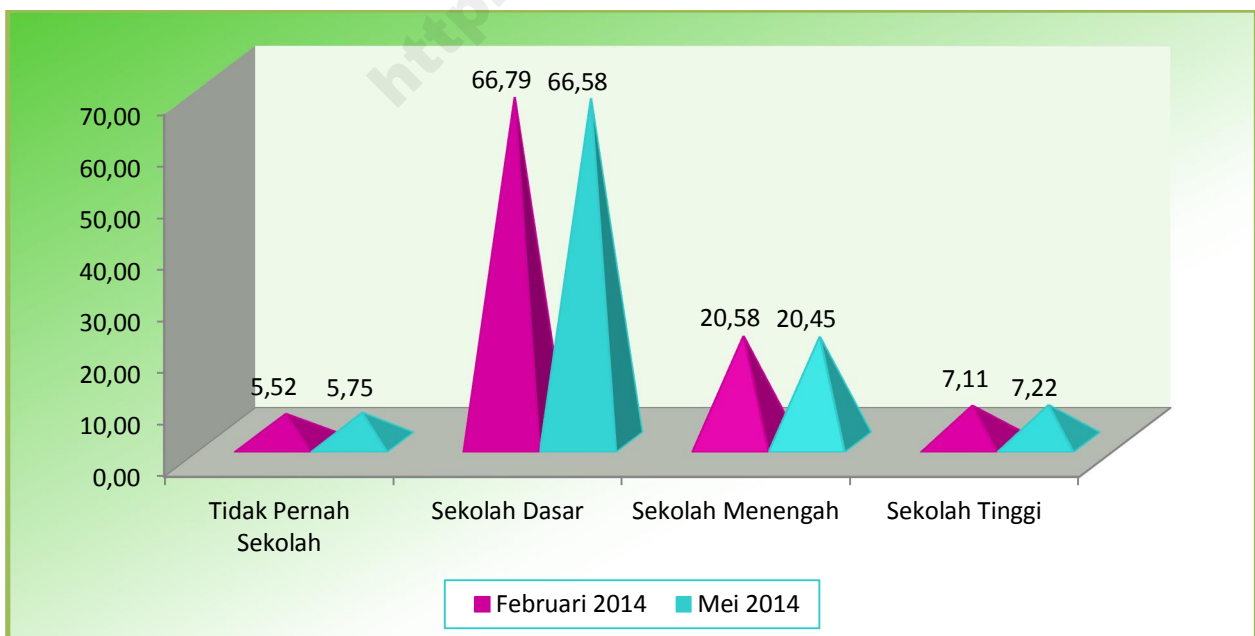
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin selama Sakernas periode Februari 2014–Mei 2014, penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terdapat pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Sebagai gambaran, pada Februari 2014, dari 100 orang penduduk yang bekerja, terdapat 9 orang laki-laki yang termasuk setengah penganggur, sedangkan pada Mei 2014, turun menjadi sebanyak 8 orang.

Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode Februari 2014–Mei 2014 penurunan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Mei 2014 bila dibandingkan dengan Februari 2014, terjadi penurunan sebesar 1,02 persen poin di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan penurunan hanya sebesar 0,61 persen poin.

Masih merujuk pada hasil Sakernas Mei 2014 (Grafik 14), persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 66,58 persen. Dengan kata lain dari 100 orang setengah penganggur 67 orang diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Jika dibandingkan

dengan kondisi Februari 2014 terjadi penurunan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah yaitu masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,13 persen poin. Penurunan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan penurunan persentase setengah penganggur pada jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 1,41 persen poin. Berdasarkan klasifikasi wilayah kota-desa penurunan persentase tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan masing-masing sebesar 0,41 persen poin dan 0,17 persen poin. Sementara untuk tingkat pendidikan sekolah menengah penurunan persentase setengah penganggur hanya terjadi pada laki-laki yaitu sebesar 0,89 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2014



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014

Tingkat Pendidikan	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	5,43	5,52	5,75
Laki-laki	4,51	4,03	4,33
Perempuan	6,91	7,76	7,80
Perkotaan	2,38	2,93	3,60
Perdesaan	6,93	6,80	6,80
Sekolah Dasar	67,94	66,79	66,58
Laki-laki	70,23	69,29	70,02
Perempuan	64,25	63,01	61,60
Perkotaan	59,01	56,89	56,48
Perdesaan	72,36	71,71	71,54
Sekolah Menengah	19,86	20,58	20,45
Laki-laki	20,60	22,02	21,13
Perempuan	18,67	18,42	19,48
Perkotaan	27,66	28,33	28,02
Perdesaan	16,01	16,74	16,74
Sekolah Tinggi	6,77	7,11	7,22
Laki-laki	4,66	4,66	4,52
Perempuan	10,17	10,81	11,12
Perkotaan	10,95	11,85	11,90
Perdesaan	4,70	4,75	4,92

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 30,67 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,67 persen.

Hasil Sakernas November 2013, Februari 2014, dan Mei 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan Februari 2014, tingkat ketidakaktifan pada Mei

2014 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan November 2013 turun sebesar 0,25 persen poin. Sejalan dengan penurunan tingkat ketidakaktifan (Sakernas Februari 2014 – Mei 2014), jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 100 ribu orang dari 55,85 juta orang pada Februari 2014 menjadi 55,75 juta orang pada Mei 2014 (Lampiran 17).

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2013 dan 2014

Tingkat ketidakaktifan	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	30,92	30,83	30,67
Laki-laki	14,70	14,96	14,95
Perempuan	47,06	46,63	46,32
Perkotaan	32,64	32,82	32,65
Perdesaan	29,15	28,77	28,63

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 15 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 46 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, terjadi

penurunan tingkat ketidakaktifan pada laki-laki sebesar 0,01 persen poin, sedangkan pada perempuan naik sebesar 0,31 persen poin.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Mei 2014 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 32,65 persen, sementara di daerah perdesaan hanya

sebesar 28,63 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Mei 2014 mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin bila dibandingkan keadaan Februari 2014. Sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin, yaitu dari 28,77 persen pada Februari 2014 menjadi 28,63 persen pada Mei 2014.

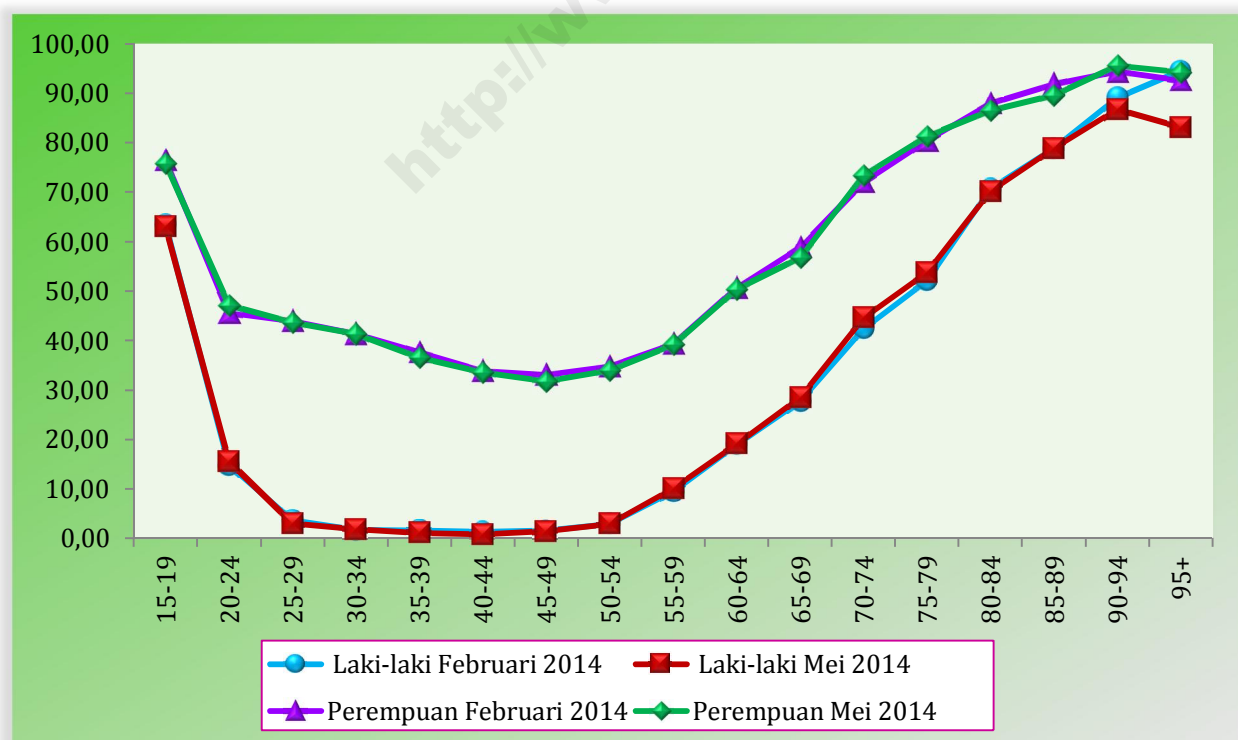
Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 15 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf "J").

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Mei 2014, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 62,91 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 0,85 persen pada kelompok umur (40–44) tahun. Dan kembali meningkat pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 75,69 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45–49) tahun yaitu sebesar 31,81 persen, kembali meningkat pada kelompok umur (50–54) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Februari dan Mei 2014



6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2014, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Februari 2014. Angkatan kerja pada Mei 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 60,00 persen.

Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,85 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,90 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,25 persen (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Mei 2014, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 12,12 persen dibandingkan 8,48 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada Februari 2014 maupun Mei 2014, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (mencapai 50 persen lebih), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah.

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, padahal program

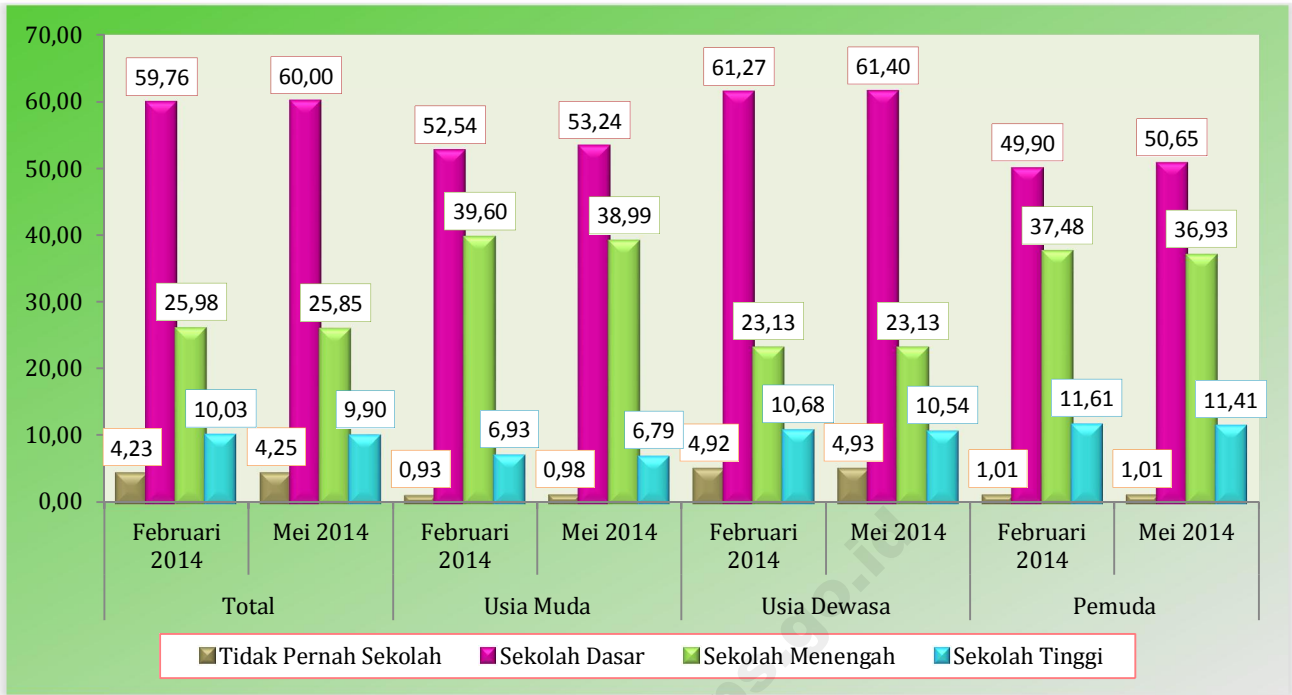
wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Sementara itu, seperti tampak pada Grafik 17, pada Mei 2014, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

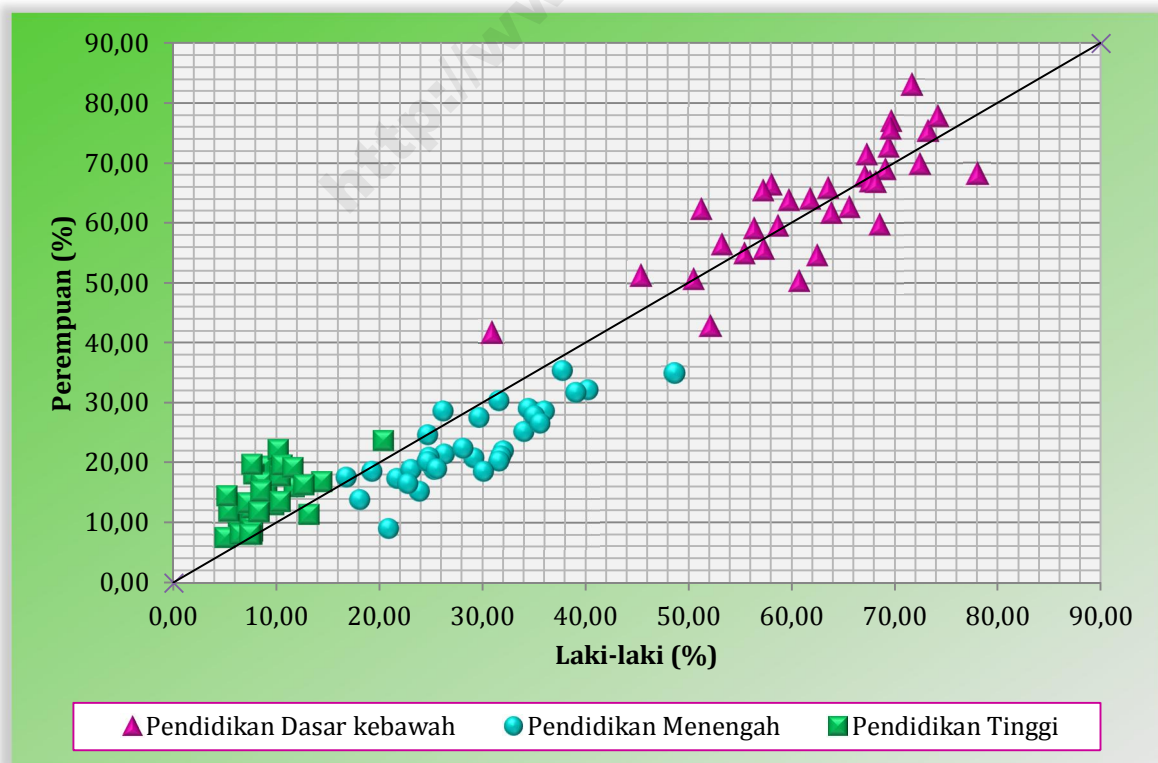
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014

Tingkat Pendidikan	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,31	4,23	4,25
Laki-laki	3,04	2,92	2,89
Perempuan	6,35	6,31	6,39
Perkotaan	1,86	1,88	1,81
Perdesaan	6,70	6,51	6,62
Sekolah Dasar	59,96	59,76	60,00
Laki-laki	60,26	59,87	60,29
Perempuan	59,46	59,59	59,55
Perkotaan	47,45	47,04	47,33
Perdesaan	72,20	72,13	72,34
Sekolah Menengah	25,87	25,98	25,85
Laki-laki	28,29	28,56	28,34
Perempuan	21,99	21,88	21,94
Perkotaan	35,50	35,77	35,68
Perdesaan	16,45	16,46	16,29
Sekolah Tinggi	9,86	10,03	9,90
Laki-laki	8,41	8,65	8,48
Perempuan	12,20	12,22	12,12
Perkotaan	15,19	15,31	15,18
Perdesaan	4,65	4,90	4,75

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Mei 2014



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Mei 2014



Lampiran

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu),
2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 635	1 676	3 311	1 643	1 685	3 327	1 651	1 693	3 344
Sumatera Utara	4 553	4 683	9 236	4 566	4 698	9 264	4 582	4 713	9 295
Sumatera Barat	1 734	1 800	3 535	1 740	1 806	3 546	1 745	1 812	3 557
Riau	2 141	2 020	4 162	2 155	2 033	4 188	2 168	2 046	4 214
Jambi	1 203	1 148	2 351	1 208	1 153	2 361	1 213	1 158	2 371
Sumatera Selatan	2 821	2 749	5 569	2 831	2 758	5 589	2 841	2 768	5 609
Bengkulu	660	636	1 296	663	639	1 302	665	642	1 307
Lampung	2 923	2 772	5 695	2 932	2 780	5 711	2 941	2 788	5 729
Kep. Bangka Belitung	498	456	954	500	458	959	503	461	964
Kepulauan Riau	667	638	1 305	672	643	1 315	677	648	1 325
DKI Jakarta	3 789	3 769	7 557	3 799	3 778	7 577	3 809	3 789	7 597
Jawa Barat	16 653	16 295	32 948	16 715	16 358	33 073	16 779	16 419	33 198
Jawa Tengah	12 223	12 707	24 929	12 247	12 731	24 978	12 270	12 756	25 026
DI Yogyakarta	1 379	1 442	2 822	1 383	1 446	2 830	1 387	1 451	2 838
Jawa Timur	14 305	15 024	29 329	14 329	15 048	29 377	14 351	15 072	29 423
Banten	4 175	4 023	8 199	4 198	4 045	8 243	4 221	4 067	8 288
Bali	1 528	1 529	3 057	1 533	1 534	3 066	1 537	1 538	3 076
Nusa Tenggara Barat	1 558	1 734	3 292	1 563	1 740	3 302	1 568	1 745	3 313
Nusa Tenggara Timur	1 565	1 641	3 206	1 571	1 648	3 219	1 578	1 655	3 233
Kalimantan Barat	1 664	1 604	3 267	1 670	1 611	3 281	1 677	1 617	3 294
Kalimantan Tengah	894	807	1 701	899	812	1 711	905	816	1 721
Kalimantan Selatan	1 387	1 367	2 754	1 393	1 373	2 766	1 399	1 379	2 778
Kalimantan Timur	1 465	1 297	2 761	1 474	1 305	2 779	1 483	1 313	2 796
Sulawesi Utara	890	858	1 748	892	861	1 753	895	863	1 758
Sulawesi Tengah	1 011	970	1 981	1 015	974	1 989	1 019	978	1 997
Sulawesi Selatan	2 829	3 086	5 914	2 836	3 094	5 930	2 844	3 102	5 946
Sulawesi Tenggara	790	801	1 591	794	805	1 599	798	810	1 608
Gorontalo	389	394	783	390	396	786	392	397	789
Sulawesi Barat	416	423	840	419	425	844	421	427	848
Maluku	542	543	1 084	544	545	1 089	547	548	1 094
Maluku Utara	377	362	739	379	364	743	381	366	747
Papua Barat	304	266	570	306	268	574	308	269	577
Papua	1 113	974	2 087	1 118	979	2 097	1 124	984	2 108
Indonesia	90 078	90 495	180 573	90 378	90 792	181 170	90 680	91 089	181 769

Lampiran 2 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta),
2013 dan 2014

Kelompok Umur	2013		2014	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
15 Tahun ke atas	180,57	177,23	181,77	
Laki-laki	90,08	88,48	90,68	
Perempuan	90,49	88,76	91,09	
Perkotaan	91,62	90,15	92,30	
Perdesaan	88,95	87,09	89,47	
(15–24)	43,43	43,58	43,73	
Laki-laki	22,00	22,08	22,15	
Perempuan	21,43	21,50	21,57	
Perkotaan	22,48	22,57	22,65	
Perdesaan	20,95	21,01	21,07	
(15–64)	167,95	168,57	169,20	
Laki-laki	84,43	84,75	85,05	
Perempuan	83,51	83,81	84,15	
Perkotaan	86,02	86,34	86,68	
Perdesaan	81,93	82,23	82,53	
(25–54)	106,98	107,34	107,69	
Laki-laki	53,55	53,73	53,91	
Perempuan	53,42	53,60	53,78	
Perkotaan	54,93	55,13	55,33	
Perdesaan	52,05	52,20	52,36	
(25–34)	41,25	41,39	41,53	
Laki-laki	20,58	20,65	20,72	
Perempuan	20,67	20,74	20,81	
Perkotaan	21,68	21,76	21,84	
Perdesaan	19,57	19,63	19,69	
(35–54)	65,73	65,95	66,16	
Laki-laki	32,98	33,09	33,20	
Perempuan	32,75	32,86	32,97	
Perkotaan	33,25	33,37	33,49	
Perdesaan	32,48	32,57	32,67	
(55–64)	17,54	17,66	17,78	
Laki-laki	8,88	8,95	8,99	
Perempuan	8,66	8,71	8,80	
Perkotaan	8,61	8,64	8,69	
Perdesaan	8,93	9,01	9,09	
65 Tahun ke atas	12,63	12,60	12,57	
Laki-laki	5,65	5,62	5,63	
Perempuan	6,98	6,98	6,94	
Perkotaan	5,60	5,62	5,62	
Perdesaan	7,02	6,98	6,95	

Lampiran 3 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 365	776	2 141	1 363	810	2 173	1 370	815	2 185
Sumatera Utara	3 893	2 829	6 722	3 895	2 871	6 766	3 907	2 884	6 791
Sumatera Barat	1 486	1 024	2 509	1 487	1 015	2 503	1 476	1 051	2 526
Riau	1 828	990	2 819	1 844	957	2 801	1 850	964	2 815
Jambi	1 025	545	1 571	1 020	551	1 570	1 012	546	1 558
Sumatera Selatan	2 383	1 491	3 874	2 440	1 582	4 022	2 420	1 608	4 028
Bengkulu	567	379	945	569	399	968	571	386	957
Lampung	2 591	1 433	4 024	2 571	1 458	4 029	2 565	1 505	4 070
Kep Bangka Belitung	432	214	646	433	208	641	428	209	637
Kepulauan Riau	583	302	885	593	299	892	603	303	907
DKI Jakarta	3 247	1 977	5 224	3 230	1 959	5 189	3 282	2 085	5 367
Jawa Barat	14 275	7 073	21 348	14 182	7 105	21 287	14 305	7 253	21 558
Jawa Tengah	10 477	7 415	17 891	10 399	7 318	17 716	10 463	7 476	17 939
DI Yogyakarta	1 106	931	2 037	1 075	958	2 033	1 097	910	2 008
Jawa Timur	12 145	8 362	20 507	12 242	8 475	20 718	12 206	8 428	20 634
Banten	3 580	1 919	5 499	3 540	1 939	5 479	3 600	1 976	5 577
Bali	1 300	1 076	2 376	1 299	1 111	2 410	1 297	1 073	2 370
Nusa Tenggara Barat	1 298	913	2 210	1 340	995	2 335	1 308	1 003	2 311
Nusa Tenggara Timur	1 282	1 022	2 304	1 302	1 081	2 383	1 285	1 052	2 337
Kalimantan Barat	1 433	966	2 398	1 422	947	2 369	1 421	940	2 362
Kalimantan Tengah	781	456	1 237	790	458	1 248	789	439	1 228
Kalimantan Selatan	1 240	770	2 010	1 233	785	2 018	1 199	789	1 988
Kalimantan Timur	1 265	604	1 868	1 279	645	1 924	1 316	607	1 923
Sulawesi Utara	764	393	1 157	768	392	1 159	751	391	1 142
Sulawesi Tengah	865	523	1 388	874	554	1 428	882	547	1 428
Sulawesi Selatan	2 330	1 319	3 650	2 330	1 348	3 678	2 354	1 411	3 765
Sulawesi Tenggara	665	450	1 115	673	463	1 136	669	465	1 134
Gorontalo	323	201	524	323	197	521	325	194	519
Sulawesi Barat	354	245	599	356	245	601	355	259	614
Maluku	434	300	734	439	289	728	443	286	729
Maluku Utara	313	174	488	311	182	493	311	188	499
Papua Barat	249	141	389	258	150	408	266	151	417
Papua	957	694	1 651	977	712	1 689	993	705	1 698
Indonesia	76 834	47 908	124 743	76 859	48 458	125 317	77 121	48 899	126 020

Lampiran 4 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2013 dan 2014

Kelompok Umur	2013		2014	
	November	Februari	Mei	
(1)	(2)	(3)	(4)	
15 Tahun ke atas	124,74	125,32	126,02	
Laki-laki	76,83	76,86	77,12	
Perempuan	47,91	48,46	48,90	
Perkotaan	61,72	61,78	62,16	
Perdesaan	63,03	63,54	63,86	
(15–24)	21,94	21,70	21,65	
Laki-laki	13,42	13,35	13,35	
Perempuan	8,51	8,35	8,29	
Perkotaan	11,22	11,04	10,92	
Perdesaan	10,72	10,66	10,73	
(15–64)	119,65	120,15	120,91	
Laki-laki	73,66	73,67	73,99	
Perempuan	45,99	46,48	46,91	
Perkotaan	59,92	59,94	60,30	
Perdesaan	59,72	60,21	60,61	
(25–54)	85,34	85,85	86,60	
Laki-laki	52,56	52,59	52,91	
Perempuan	32,79	33,27	33,69	
Perkotaan	43,20	43,36	43,79	
Perdesaan	42,14	42,49	42,82	
(25–34)	31,88	31,99	32,18	
Laki-laki	20,08	20,09	20,21	
Perempuan	11,80	11,90	11,97	
Perkotaan	16,81	16,81	16,90	
Perdesaan	15,07	15,18	15,28	
(35–54)	53,46	53,86	54,42	
Laki-laki	32,47	32,49	32,71	
Perempuan	20,98	21,37	21,72	
Perkotaan	26,39	26,55	26,88	
Perdesaan	27,07	27,31	27,54	
(55–64)	12,37	12,60	12,66	
Laki-laki	7,68	7,74	7,73	
Perempuan	4,69	4,86	4,93	
Perkotaan	5,50	5,54	5,60	
Perdesaan	6,87	7,06	7,06	
65 Tahun ke atas	5,09	5,17	5,11	
Laki-laki	3,17	3,19	3,13	
Perempuan	1,92	1,98	1,99	
Perkotaan	1,79	1,83	1,86	
Perdesaan	3,30	3,33	3,25	

Lampiran 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	83,48	46,30	64,66	83,00	48,08	65,32	83,01	48,13	65,35
Sumatera Utara	85,51	60,41	72,78	85,31	61,11	73,04	85,26	61,20	73,06
Sumatera Barat	85,68	56,85	71,00	85,49	56,22	70,58	84,56	57,99	71,02
Riau	85,39	49,02	67,73	85,57	47,08	66,88	85,33	47,14	66,79
Jambi	85,25	47,51	66,82	84,40	47,75	66,51	83,37	47,17	65,69
Sumatera Selatan	84,47	54,26	69,56	86,20	57,34	71,96	85,16	58,09	71,80
Bengkulu	85,84	59,50	72,91	85,89	62,44	74,38	85,79	60,23	73,24
Lampung	88,64	51,69	70,66	87,70	52,45	70,55	87,24	53,96	71,04
Kep. Bangka Belitung	86,87	46,89	67,75	86,48	45,40	66,84	85,11	45,37	66,11
Kepulauan Riau	87,36	47,34	67,79	88,20	46,55	67,83	89,14	46,78	68,42
DKI Jakarta	85,71	52,45	69,13	85,04	51,85	68,49	86,17	55,04	70,64
Jawa Barat	85,72	43,41	64,79	84,84	43,44	64,36	85,25	44,18	64,94
Jawa Tengah	85,71	58,35	71,77	84,91	57,48	70,93	85,27	58,60	71,68
DI Yogyakarta	80,16	64,56	72,19	77,70	66,24	71,84	79,10	62,74	70,74
Jawa Timur	84,90	55,66	69,92	85,44	56,32	70,52	85,05	55,92	70,13
Banten	85,75	47,71	67,08	84,33	47,94	66,47	85,30	48,59	67,28
Bali	85,10	70,35	77,72	84,78	72,43	78,61	84,39	69,75	77,07
Nusa Tenggara Barat	83,30	52,64	67,15	85,76	57,19	70,71	83,42	57,47	69,75
Nusa Tenggara Timur	81,93	62,28	71,87	82,88	65,60	74,04	81,45	63,56	72,29
Kalimantan Barat	86,12	60,21	73,40	85,15	58,79	72,21	84,76	58,16	71,70
Kalimantan Tengah	87,35	56,52	72,73	87,82	56,42	72,93	87,20	53,79	71,35
Kalimantan Selatan	89,42	56,35	73,01	88,51	57,16	72,95	85,69	57,22	71,56
Kalimantan Timur	86,34	46,55	67,65	86,77	49,43	69,23	88,71	46,24	68,77
Sulawesi Utara	85,83	45,85	66,20	86,04	45,50	66,14	83,92	45,32	64,98
Sulawesi Tengah	85,58	53,89	70,07	86,08	56,91	71,79	86,51	55,92	71,53
Sulawesi Selatan	82,39	42,76	61,71	82,15	43,56	62,02	82,79	45,48	63,32
Sulawesi Tenggara	84,23	56,17	70,10	84,77	57,54	71,05	83,83	57,41	70,53
Gorontalo	83,07	51,10	66,98	82,82	49,89	66,25	82,93	48,76	65,73
Sulawesi Barat	84,89	57,97	71,32	85,02	57,56	71,18	84,50	60,55	72,42
Maluku	80,11	55,29	67,69	80,72	52,99	66,84	81,00	52,26	66,62
Maluku Utara	83,09	48,23	66,02	82,11	50,09	66,43	81,71	51,32	66,83
Papua Barat	81,76	52,93	68,31	84,19	56,01	71,05	86,27	56,23	72,26
Papua	85,96	71,26	79,10	87,41	72,69	80,54	88,39	71,65	80,58
Indonesia	85,30	52,94	69,08	85,04	53,37	69,17	85,05	53,68	69,33

Lampiran 6 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 261	709	1 970	1 274	752	2 027	1.274	755	2.029
Sumatera Utara	3 688	2 627	6 314	3 703	2 661	6 364	3.702	2.675	6.377
Sumatera Barat	1 405	953	2 358	1 401	944	2 344	1.390	987	2.377
Riau	1 745	937	2 683	1 764	897	2 661	1.775	909	2.684
Jambi	999	531	1 530	998	533	1 531	990	534	1.524
Sumatera Selatan	2 285	1 435	3 720	2 337	1 530	3 868	2.334	1.556	3.889
Bengkulu	552	367	919	560	392	952	558	380	938
Lampung	2 493	1 334	3 828	2 455	1 370	3 824	2.480	1.384	3.864
Kep Bangka Belitung	424	206	630	420	203	624	417	203	619
Kepulauan Riau	570	281	851	570	275	845	573	278	851
DKI Jakarta	2 992	1 783	4 775	2 919	1 760	4 679	3.010	1.860	4.870
Jawa Barat	13 112	6 369	19 481	12 975	6 468	19 444	13.085	6.580	19.665
Jawa Tengah	9 863	6 993	16 856	9 810	6 941	16 751	9.880	7.063	16.942
DI Yogyakarta	1 077	897	1 975	1 046	943	1 989	1.074	901	1.976
Jawa Timur	11 748	7 947	19 696	11 756	8 130	19 885	11.734	8.070	19.804
Banten	3 239	1 753	4 992	3 188	1 750	4 938	3.255	1.782	5.037
Bali	1 272	1 062	2 334	1 277	1 100	2 377	1.280	1.064	2.344
Nusa Tenggara Barat	1 235	876	2 112	1 266	945	2 211	1.258	976	2.234
Nusa Tenggara Timur	1 253	987	2 240	1 273	1 063	2 336	1.257	1.033	2.290
Kalimantan Barat	1 399	944	2 343	1 386	923	2 309	1.385	920	2.305
Kalimantan Tengah	768	438	1 206	771	443	1 214	761	425	1.186
Kalimantan Selatan	1 199	744	1 943	1 184	753	1 936	1.151	754	1.905
Kalimantan Timur	1 163	559	1 722	1 176	577	1 753	1.188	564	1.752
Sulawesi Utara	727	355	1 082	730	345	1 075	712	350	1.062
Sulawesi Tengah	838	509	1 346	848	538	1 386	857	528	1.385
Sulawesi Selatan	2 240	1 230	3 470	2 215	1 249	3 465	2.242	1.314	3.556
Sulawesi Tenggara	653	434	1 087	660	452	1 112	652	452	1.103
Gorontalo	315	193	508	317	191	508	315	188	503
Sulawesi Barat	349	241	590	352	240	591	354	255	608
Maluku	411	270	682	418	262	680	414	267	681
Maluku Utara	297	161	458	299	167	465	299	178	477
Papua Barat	238	134	372	249	143	393	253	146	399
Papua	923	674	1 597	943	687	1 630	945	685	1.630
Indonesia	72 732	44 935	117 667	72 540	45 630	118 170	72.851	46.013	118.864

Lampiran 7 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	77,13	42,30	59,50	77,58	44,66	60,91	77,14	44,62	60,68
Sumatera Utara	81,01	56,08	68,37	81,09	56,65	68,69	80,79	56,75	68,60
Sumatera Barat	81,02	52,93	66,71	80,50	52,26	66,12	79,65	54,49	66,83
Riau	81,52	46,39	64,46	81,86	44,13	63,55	81,83	44,43	63,68
Jambi	83,07	46,23	65,08	82,65	46,19	64,84	81,58	46,13	64,27
Sumatera Selatan	81,01	52,21	66,80	82,56	55,48	69,20	82,13	56,19	69,33
Bengkulu	83,61	57,72	70,90	84,49	61,43	73,17	83,86	59,22	71,77
Lampung	85,29	48,14	67,21	83,72	49,28	66,96	84,35	49,64	67,46
Kep. Bangka Belitung	85,10	45,18	66,02	84,02	44,34	65,05	82,81	43,94	64,23
Kepulauan Riau	85,45	43,96	65,16	84,78	42,83	64,26	84,63	42,87	64,21
DKI Jakarta	78,97	47,31	63,18	76,85	46,57	61,75	79,03	49,09	64,10
Jawa Barat	78,74	39,08	59,13	77,63	39,54	58,79	77,99	40,07	59,24
Jawa Tengah	80,69	55,03	67,61	80,10	54,52	67,06	80,52	55,37	67,70
DI Yogyakarta	78,09	62,22	69,98	75,62	65,18	70,28	77,42	62,14	69,61
Jawa Timur	82,13	52,90	67,15	82,04	54,03	67,69	81,76	53,54	67,31
Banten	77,58	43,56	60,89	75,94	43,26	59,91	77,11	43,82	60,77
Bali	83,25	69,44	76,35	83,31	71,75	77,53	83,30	69,15	76,22
Nusa Tenggara Barat	79,30	50,55	64,15	81,02	54,33	66,96	80,23	55,91	67,42
Nusa Tenggara Timur	80,04	60,15	69,86	81,03	64,52	72,58	79,63	62,43	70,83
Kalimantan Barat	84,10	58,86	71,71	82,97	57,33	70,38	82,58	56,90	69,97
Kalimantan Tengah	85,83	54,33	70,89	85,67	54,64	70,95	84,17	52,01	68,91
Kalimantan Selatan	86,41	54,47	70,56	84,96	54,84	70,01	82,25	54,67	68,56
Kalimantan Timur	79,42	43,08	62,36	79,80	44,20	63,08	80,11	42,92	62,64
Sulawesi Utara	81,65	41,42	61,90	81,80	40,11	61,33	79,52	40,53	60,38
Sulawesi Tengah	82,85	52,43	67,95	83,55	55,26	69,70	84,06	54,04	69,36
Sulawesi Selatan	79,19	39,87	58,68	78,11	40,38	58,43	78,83	42,38	59,81
Sulawesi Tenggara	82,67	54,18	68,32	83,12	56,16	69,54	81,66	55,78	68,62
Gorontalo	81,06	48,87	64,85	81,32	48,16	64,63	80,32	47,42	63,76
Sulawesi Barat	83,75	57,02	70,28	83,98	56,32	70,04	84,06	59,57	71,71
Maluku	75,92	49,85	62,87	76,84	48,07	62,44	75,76	48,70	62,22
Maluku Utara	78,82	44,50	62,01	78,82	45,85	62,67	78,50	48,66	63,88
Papua Barat	78,08	50,53	65,24	81,36	53,61	68,42	82,12	54,03	69,03
Papua	82,91	69,21	76,51	84,36	70,16	77,73	84,05	69,66	77,33
Indonesia	80,74	49,65	65,16	80,26	50,26	65,23	80,34	50,52	65,39

Lampiran 8 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013 dan 2014

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	34,15	32,51	33,33	4,08	3,91	4,76	36,70	37,27	37,52
Sumatera Utara	30,77	30,51	29,62	3,66	3,26	2,77	35,49	36,73	36,81
Sumatera Barat	29,90	30,60	30,90	4,75	5,20	4,33	38,99	40,12	39,31
Riau	41,67	41,84	43,37	5,05	5,20	5,08	33,91	32,61	32,10
Jambi	35,03	35,38	36,37	4,48	4,91	4,32	37,19	37,86	38,43
Sumatera Selatan	33,30	33,59	33,60	2,25	2,34	2,11	37,17	36,37	38,30
Bengkulu	25,42	26,21	25,94	2,97	3,11	3,65	40,09	39,78	40,12
Lampung	26,23	25,18	25,97	3,45	3,54	4,45	37,14	38,29	37,29
Kep Bangka Belitung	41,95	40,94	39,85	8,81	7,44	7,93	34,63	35,46	34,49
Kepulauan Riau	63,37	60,46	62,84	1,79	2,23	3,39	25,99	28,31	26,09
DKI Jakarta	67,90	67,85	68,38	3,64	3,80	4,15	21,32	20,41	19,48
Jawa Barat	43,16	43,86	43,92	3,53	3,30	3,57	29,43	29,20	28,71
Jawa Tengah	33,15	34,25	32,99	3,16	3,69	3,49	34,61	34,29	34,92
DI Yogyakarta	39,94	41,81	41,76	3,98	4,10	3,54	32,72	32,11	32,87
Jawa Timur	30,73	30,74	31,82	3,70	3,54	3,14	34,17	34,20	34,62
Banten	55,02	56,45	56,22	4,17	4,42	3,91	25,73	24,57	24,70
Bali	39,10	38,27	40,56	3,76	3,64	3,74	31,26	33,31	32,13
Nusa Tenggara Barat	22,26	22,10	20,76	2,88	2,59	3,14	40,75	39,46	39,46
Nusa Tenggara Timur	18,28	17,33	18,63	1,48	1,33	1,92	42,30	41,75	41,19
Kalimantan Barat	31,25	30,93	32,26	3,08	3,50	3,41	36,97	37,89	36,59
Kalimantan Tengah	37,66	38,66	37,75	2,56	2,22	2,73	37,08	37,47	38,92
Kalimantan Selatan	34,12	33,55	33,12	2,29	3,02	1,79	40,00	41,66	41,42
Kalimantan Timur	52,62	54,32	54,81	3,77	3,14	3,81	28,78	27,56	28,25
Sulawesi Utara	35,88	35,52	37,79	4,76	4,01	3,35	38,03	36,92	38,49
Sulawesi Tengah	30,02	29,59	26,19	3,15	3,35	4,34	38,80	38,27	38,52
Sulawesi Selatan	33,53	32,61	31,41	3,99	4,37	4,66	40,40	41,23	41,34
Sulawesi Tenggara	29,38	28,11	28,61	3,54	3,86	3,96	40,19	40,83	40,20
Gorontalo	35,36	34,55	31,20	3,93	2,99	2,88	38,98	40,85	43,83
Sulawesi Barat	23,49	27,75	23,99	2,35	2,66	2,76	43,70	39,06	39,88
Maluku	28,96	29,08	26,75	1,72	1,87	1,08	40,75	44,97	46,05
Maluku Utara	29,14	32,02	28,39	2,39	1,95	2,57	42,96	43,55	43,61
Papua Barat	37,20	36,61	37,05	1,10	1,63	1,97	35,15	34,95	36,85
Papua	16,97	16,69	16,54	2,05	1,28	1,11	43,01	41,74	43,07
Indonesia	36,51	36,68	36,79	3,49	3,51	3,47	33,88	33,90	33,95

Lampiran 8 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013 dan 2014
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	7,16	7,29	6,01	17,91	19,03	18,39	61,77	63,59	61,91
Sumatera Utara	7,26	6,50	6,62	22,82	23,00	24,18	65,57	66,23	67,61
Sumatera Barat	10,63	8,94	11,11	15,73	15,14	14,34	65,35	64,20	64,76
Riau	5,89	5,72	6,07	13,49	14,62	13,38	53,28	52,96	51,55
Jambi	6,12	5,11	5,40	17,17	16,75	15,48	60,49	59,72	59,31
Sumatera Selatan	4,81	5,45	3,69	22,46	22,26	22,30	64,45	64,08	64,30
Bengkulu	7,69	6,48	8,51	23,82	24,42	21,78	71,60	70,67	70,41
Lampung	10,93	11,19	10,96	22,26	21,79	21,34	70,32	71,28	69,59
Kep. Bangka Belitung	3,99	4,30	4,92	10,62	11,85	12,82	49,24	51,61	52,22
Kepulauan Riau	2,68	3,56	2,80	6,17	5,44	4,88	34,84	37,31	33,77
DKI Jakarta	3,18	2,91	1,96	3,96	5,02	6,04	28,46	28,35	27,47
Jawa Barat	14,69	14,78	15,35	9,20	8,87	8,46	53,32	52,85	52,52
Jawa Tengah	14,95	13,69	15,26	14,14	14,09	13,34	63,69	62,06	63,52
DI Yogyakarta	6,77	5,13	6,71	16,59	16,85	15,13	56,07	54,09	54,70
Jawa Timur	13,12	12,71	13,33	18,29	18,80	17,09	65,58	65,71	65,04
Banten	8,64	6,38	8,15	6,44	8,17	7,03	40,82	39,13	39,88
Bali	9,77	8,67	8,65	16,11	16,10	14,92	57,15	58,09	55,70
Nusa Tenggara Barat	15,46	12,91	15,15	18,66	22,94	21,49	74,87	75,31	76,10
Nusa Tenggara Timur	4,54	5,17	4,08	33,40	34,42	34,17	80,24	81,35	79,45
Kalimantan Barat	4,56	4,46	3,88	24,15	23,21	23,85	65,67	65,56	64,32
Kalimantan Tengah	5,01	3,86	3,19	17,69	17,80	17,41	59,78	59,13	59,53
Kalimantan Selatan	6,06	5,27	6,37	17,54	16,50	17,30	63,60	63,43	65,09
Kalimantan Timur	3,93	2,71	3,16	10,90	12,28	9,97	43,61	42,54	41,38
Sulawesi Utara	11,09	12,18	9,67	10,23	11,37	10,70	59,36	60,47	58,85
Sulawesi Tengah	7,91	7,90	7,14	20,12	20,88	23,81	66,83	67,05	69,47
Sulawesi Selatan	4,63	3,84	3,93	17,45	17,96	18,66	62,48	63,02	63,93
Sulawesi Tenggara	4,25	3,00	3,70	22,63	24,19	23,53	67,08	68,02	67,42
Gorontalo	9,44	9,68	8,61	12,29	11,92	13,49	60,71	62,46	65,93
Sulawesi Barat	4,40	5,77	5,82	26,06	24,76	27,56	74,15	69,59	73,25
Maluku	3,25	1,73	2,19	25,33	22,35	23,93	69,33	69,05	72,18
Maluku Utara	4,04	5,10	4,68	21,47	17,39	20,75	68,47	66,03	69,03
Papua Barat	3,40	2,17	2,24	23,15	24,64	21,89	61,70	61,77	60,98
Papua	1,95	2,33	2,82	36,02	37,96	36,46	80,98	82,03	82,35
Indonesia	10,28	9,72	10,20	15,84	16,19	15,60	60,00	59,81	59,75

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 9 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	46,89	13,35	39,76	47,15	13,39	39,46	47,54	11,97	40,49
Sumatera Utara	49,38	11,90	38,73	48,05	11,23	40,72	50,05	11,04	38,91
Sumatera Barat	41,66	14,23	44,11	41,68	14,24	44,08	40,45	15,05	44,50
Riau	41,76	13,09	45,14	42,41	13,08	44,50	40,95	14,50	44,55
Jambi	49,47	8,26	42,27	49,35	8,09	42,56	52,35	8,16	39,49
Sumatera Selatan	52,55	11,81	35,63	52,26	11,93	35,80	54,34	10,70	34,96
Bengkulu	58,13	8,89	32,98	58,30	7,71	33,99	56,68	7,87	35,45
Lampung	50,51	13,61	35,88	48,51	12,98	38,51	50,24	13,31	36,45
Kep. Bangka Belitung	26,37	31,47	42,15	28,54	30,73	40,73	30,00	32,34	37,66
Kepulauan Riau	13,41	37,16	49,43	13,96	31,38	54,65	13,05	30,22	56,73
DKI Jakarta	1,87	17,30	80,84	2,17	19,48	78,35	1,63	19,12	79,25
Jawa Barat	19,76	30,32	49,92	19,80	29,68	50,52	20,10	29,05	50,85
Jawa Tengah	30,65	29,44	39,91	30,99	28,58	40,44	31,65	28,85	39,50
DI Yogyakarta	24,51	21,26	54,23	25,42	20,04	54,54	25,08	20,88	54,04
Jawa Timur	38,42	21,74	39,84	36,86	21,48	41,65	36,90	21,56	41,54
Banten	14,71	29,11	56,17	14,42	28,31	57,27	15,74	27,32	56,94
Bali	23,48	24,75	51,78	24,82	24,66	50,52	23,83	24,89	51,28
Nusa Tenggara Barat	40,86	16,74	42,39	45,48	13,07	41,46	48,01	13,48	38,51
Nusa Tenggara Timur	62,58	11,26	26,17	65,04	9,81	25,15	62,95	10,70	26,35
Kalimantan Barat	57,29	12,60	30,11	57,19	12,28	30,54	57,31	11,40	31,29
Kalimantan Tengah	53,12	13,45	33,43	51,59	13,99	34,42	53,29	12,79	33,92
Kalimantan Selatan	36,30	23,35	40,35	36,84	22,70	40,46	38,19	21,41	40,40
Kalimantan Timur	26,69	22,39	50,92	24,27	21,38	54,36	27,30	21,50	51,20
Sulawesi Utara	33,87	16,98	49,15	31,87	17,63	50,50	33,19	16,60	50,21
Sulawesi Tengah	45,69	15,33	38,98	46,35	14,12	39,52	47,81	13,03	39,16
Sulawesi Selatan	40,48	14,46	45,06	40,65	12,53	46,82	43,62	13,07	43,31
Sulawesi Tenggara	41,17	13,38	45,45	41,90	13,56	44,54	41,74	13,73	44,53
Gorontalo	32,40	14,05	53,55	33,34	15,53	51,13	38,53	15,10	46,37
Sulawesi Barat	58,98	11,29	29,73	59,95	9,92	30,13	62,77	6,68	30,55
Maluku	52,29	10,76	36,95	50,55	10,44	39,01	55,64	9,97	34,39
Maluku Utara	52,14	9,80	38,07	47,83	11,99	40,18	48,02	10,78	41,20
Papua Barat	48,60	12,43	38,97	48,83	12,04	39,13	45,74	12,80	41,46
Papua	73,37	5,17	21,46	73,43	3,84	22,72	74,29	3,97	21,74
Indonesia	34,63	21,36	44,01	34,56	20,76	44,68	35,10	20,63	44,27

Lampiran 10 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013 dan 2014

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	573	587	586	29,09	28,95	28,87	53,30	53,26	54,91
Sumatera Utara	1 673	1 503	1 587	26,50	23,62	24,88	57,27	58,28	62,18
Sumatera Barat	643	570	610	27,28	24,33	25,68	55,96	58,67	55,56
Riau	749	714	766	27,92	26,83	28,55	51,95	49,12	49,85
Jambi	576	526	562	37,65	34,37	36,87	45,77	45,20	47,22
Sumatera Selatan	1 150	1 092	1 092	30,90	28,24	28,09	52,10	54,47	53,66
Bengkulu	248	251	224	26,97	26,37	23,87	57,36	57,28	56,93
Lampung	1 230	1 114	1 062	32,14	29,13	27,49	48,69	51,26	53,46
Kep. Bangka Belitung	140	136	125	22,16	21,82	20,27	53,19	57,29	58,56
Kepulauan Riau	125	111	125	14,71	13,14	14,67	51,74	51,33	44,56
DKI Jakarta	465	451	464	9,74	9,64	9,53	55,06	58,36	62,80
Jawa Barat	3 099	3 037	3 146	15,91	15,62	16,00	57,33	58,60	59,30
Jawa Tengah	3 418	3 571	3 484	20,28	21,32	20,56	60,71	58,04	60,99
DI Yogyakarta	446	472	417	22,58	23,75	21,13	63,14	60,87	61,50
Jawa Timur	4 804	4 768	4 825	24,39	23,98	24,36	59,87	59,62	61,03
Banten	668	633	766	13,38	12,83	15,21	58,22	60,49	55,31
Bali	555	483	514	23,79	20,30	21,91	58,50	60,93	59,81
Nusa Tenggara Barat	420	482	485	19,89	21,79	21,73	54,60	60,06	63,67
Nusa Tenggara Timur	863	841	839	38,51	36,01	36,64	58,52	60,26	60,15
Kalimantan Barat	780	704	651	33,28	30,48	28,24	57,96	55,22	58,56
Kalimantan Tengah	327	297	296	27,08	24,45	24,93	55,11	57,62	55,12
Kalimantan Selatan	601	540	562	30,95	27,89	29,53	55,08	57,47	55,50
Kalimantan Timur	266	298	324	15,46	17,01	18,49	60,89	59,33	54,67
Sulawesi Utara	223	213	215	20,57	19,80	20,27	53,14	48,96	51,72
Sulawesi Tengah	348	368	386	25,85	26,54	27,87	61,64	61,34	57,72
Sulawesi Selatan	1 072	1 115	1 167	30,88	32,19	32,82	47,40	48,75	50,86
Sulawesi Tenggara	340	304	293	31,30	27,31	26,55	58,03	61,04	60,45
Gorontalo	103	103	115	20,26	20,18	22,79	56,30	57,92	51,23
Sulawesi Barat	257	240	273	43,48	40,53	44,86	55,07	53,31	50,20
Maluku	179	164	179	26,20	24,11	26,29	57,30	56,21	60,16
Maluku Utara	132	119	125	28,90	25,57	26,17	49,91	62,71	65,11
Papua Barat	108	101	96	29,17	25,72	24,07	54,77	60,23	57,27
Papua	463	493	494	29,00	30,24	30,29	53,85	54,48	52,87
Indonesia	27 043	26 401	26 855	22,98	22,34	22,59	56,61	57,06	57,98

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1,83	2,00	2,08	7,74	9,93	7,44	16,71	15,92	15,72
Sumatera Utara	2,01	2,23	1,43	5,84	6,10	6,40	15,04	13,10	13,29
Sumatera Barat	2,67	3,15	2,36	9,27	7,02	7,81	13,51	13,87	14,33
Riau	1,77	1,24	1,10	8,44	7,02	7,48	12,53	12,94	13,00
Jambi	1,79	2,43	1,36	6,92	6,11	7,16	20,00	16,70	16,35
Sumatera Selatan	2,11	2,98	1,70	5,31	6,28	5,21	15,26	14,55	12,79
Bengkulu	3,99	2,18	2,82	7,57	7,15	5,91	13,15	11,03	11,35
Lampung	1,60	1,45	1,23	6,79	7,13	6,04	16,88	16,00	13,56
Kep Bangka Belitung	4,25	2,53	2,31	3,91	3,38	4,46	10,33	10,85	10,36
Kepulauan Riau	1,85	2,30	1,57	3,97	2,59	2,87	6,10	4,96	6,99
DKI Jakarta	0,96	1,34	0,87	2,50	2,61	2,01	6,04	3,35	4,31
Jawa Barat	1,59	1,97	1,30	4,19	4,43	4,18	9,91	9,59	8,13
Jawa Tengah	2,07	3,29	1,86	5,38	6,34	5,78	9,94	10,56	10,39
DI Yogyakarta	1,56	2,01	2,23	6,95	7,36	6,81	8,51	10,24	8,77
Jawa Timur	1,48	1,43	1,27	6,25	7,25	6,69	12,25	11,88	11,36
Banten	1,32	1,37	1,36	3,56	3,06	3,58	8,25	7,14	7,76
Bali	1,10	2,28	0,81	5,20	4,30	4,96	9,09	8,17	7,84
Nusa Tenggara Barat	3,07	2,50	2,90	10,53	11,12	8,88	13,42	13,53	14,95
Nusa Tenggara Timur	2,55	2,58	2,41	8,74	9,51	10,13	17,16	18,35	17,05
Kalimantan Barat	1,04	1,78	1,75	5,00	3,94	5,46	22,76	19,04	18,91
Kalimantan Tengah	1,39	1,34	1,77	8,31	5,90	6,30	13,78	13,11	13,24
Kalimantan Selatan	3,43	2,47	2,71	7,05	5,55	5,05	16,85	13,70	14,63
Kalimantan Timur	2,02	1,72	1,30	3,15	3,92	4,49	7,27	7,54	6,96
Sulawesi Utara	2,91	2,57	2,27	5,36	5,65	4,62	11,34	11,30	10,40
Sulawesi Tengah	2,93	3,57	3,55	8,63	7,58	9,78	12,48	14,50	13,54
Sulawesi Selatan	3,36	3,47	2,07	10,73	9,74	9,66	15,48	15,62	14,39
Sulawesi Tenggara	3,00	2,95	2,81	8,98	9,39	7,23	16,56	14,19	14,83
Gorontalo	3,86	3,49	2,45	5,12	7,42	7,44	10,72	9,18	10,21
Sulawesi Barat	4,04	4,28	3,10	19,26	15,38	17,21	19,29	19,41	20,85
Maluku	2,97	4,96	2,65	7,06	7,42	7,15	14,77	14,62	15,25
Maluku Utara	1,87	3,43	1,71	7,99	6,82	8,71	17,59	14,98	14,64
Papua Barat	1,86	2,10	2,62	5,27	5,26	5,54	15,43	11,71	12,55
Papua	1,02	0,68	0,66	6,10	5,08	3,76	16,70	18,03	19,76
Indonesia	1,89	2,19	1,61	5,93	6,16	5,87	12,15	11,67	11,22

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014
(lanjutan)

Provinsi	25-34 jam			35-39 jam			40-48 jam		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	19,12	17,75	20,82	12,18	13,14	12,72	23,05	21,78	19,94
Sumatera Utara	15,43	14,24	15,40	12,95	13,77	13,09	26,89	27,19	27,46
Sumatera Barat	15,58	12,71	13,98	10,71	11,76	9,65	24,22	26,27	24,49
Riau	14,10	14,79	15,43	10,22	9,96	8,95	26,26	26,95	26,98
Jambi	21,15	22,29	22,70	12,66	14,32	14,90	20,22	20,35	20,65
Sumatera Selatan	19,37	18,05	18,19	11,89	11,60	12,50	22,05	22,67	22,80
Bengkulu	15,62	15,94	13,68	12,62	11,58	11,57	26,97	28,33	31,49
Lampung	16,45	14,95	15,83	12,59	10,82	10,43	23,14	24,85	25,55
Kep Bangka Belitung	14,45	13,88	12,53	10,33	9,90	10,87	34,75	35,90	39,21
Kepulauan Riau	8,27	9,51	8,10	8,03	9,24	7,56	38,63	39,61	37,44
DKI Jakarta	5,08	5,09	5,20	4,11	4,39	5,11	52,13	51,28	49,05
Jawa Barat	10,94	11,29	11,66	9,19	8,16	8,74	37,06	35,86	36,97
Jawa Tengah	11,78	12,05	11,72	9,41	9,17	9,20	32,14	31,64	32,13
DI Yogyakarta	11,14	11,30	10,00	9,14	10,03	8,31	34,21	31,96	36,01
Jawa Timur	13,79	14,22	14,27	10,32	10,12	10,41	29,14	27,90	28,35
Banten	8,49	8,83	9,47	6,34	6,05	5,89	49,31	46,91	44,68
Bali	12,35	10,49	11,14	9,42	9,49	7,53	28,78	27,98	28,85
Nusa Tenggara Barat	14,35	14,97	12,29	10,68	11,04	9,04	21,56	20,54	24,28
Nusa Tenggara Timur	21,22	20,68	20,13	13,23	14,76	12,46	23,41	22,64	22,20
Kalimantan Barat	15,78	15,49	14,18	10,83	10,99	11,34	25,78	29,29	29,49
Kalimantan Tengah	16,25	15,30	15,03	9,66	10,83	11,57	26,17	28,91	28,01
Kalimantan Selatan	16,75	17,84	19,14	11,07	13,73	11,75	26,35	24,46	23,64
Kalimantan Timur	10,52	10,90	11,63	12,62	11,14	10,88	28,74	27,31	28,72
Sulawesi Utara	12,45	11,26	11,94	11,57	10,82	11,56	36,54	36,19	38,15
Sulawesi Tengah	14,00	14,60	14,75	12,14	13,15	11,94	25,71	23,63	25,71
Sulawesi Selatan	15,06	16,18	17,29	11,15	10,11	9,41	21,55	22,45	23,80
Sulawesi Tenggara	15,93	15,22	15,59	11,65	12,38	11,59	19,88	20,80	20,52
Gorontalo	11,77	13,34	14,12	13,14	9,11	10,06	22,46	19,81	22,24
Sulawesi Barat	18,71	19,80	22,68	10,28	11,34	10,83	16,55	16,26	13,15
Maluku	16,78	15,90	17,85	12,98	13,00	15,79	27,25	26,04	23,78
Maluku Utara	17,45	17,08	18,59	14,07	14,63	11,19	23,88	24,81	28,57
Papua Barat	17,51	19,05	15,75	12,05	14,55	14,62	26,37	25,43	26,80
Papua	23,04	26,27	23,98	16,78	17,88	19,72	22,03	18,95	20,93
Indonesia	13,39	13,45	13,62	10,19	10,09	9,97	31,00	30,38	30,84

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013 dan 2014
(lanjutan)

Provinsi (1)	49–59 jam			60 jam ke atas		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	11,72	11,15	12,05	7,64	8,34	9,23
Sumatera Utara	10,75	11,40	11,44	11,07	11,96	11,49
Sumatera Barat	14,60	14,25	16,04	9,43	10,98	11,34
Riau	14,50	15,40	15,33	12,18	11,70	11,73
Jambi	9,42	10,05	10,33	7,84	7,74	6,55
Sumatera Selatan	13,22	13,77	16,19	10,79	10,11	10,62
Bengkulu	13,97	16,10	16,83	6,12	7,68	6,35
Lampung	15,06	16,66	18,63	7,50	8,14	8,73
Kep Bangka Belitung	15,82	16,51	14,88	6,16	7,06	5,38
Kepulauan Riau	17,29	19,33	21,21	15,85	12,47	14,26
DKI Jakarta	12,34	14,72	14,54	16,84	17,21	18,91
Jawa Barat	13,97	15,34	15,65	13,15	13,36	13,37
Jawa Tengah	18,71	16,76	18,55	10,57	10,20	10,37
DI Yogyakarta	19,44	18,27	19,20	9,06	8,82	8,67
Jawa Timur	16,17	16,41	16,58	10,58	10,79	11,07
Banten	12,58	15,41	14,70	10,14	11,23	12,56
Bali	17,55	20,68	22,79	16,50	16,61	16,08
Nusa Tenggara Barat	17,22	15,27	18,01	9,17	11,03	9,65
Nusa Tenggara Timur	8,06	6,28	9,69	5,62	5,20	5,93
Kalimantan Barat	11,20	11,22	12,15	7,62	8,25	6,72
Kalimantan Tengah	13,45	13,32	13,16	11,00	11,30	10,92
Kalimantan Selatan	10,77	13,95	12,80	7,74	8,29	10,28
Kalimantan Timur	17,27	17,36	16,13	18,41	20,11	19,89
Sulawesi Utara	11,04	13,50	11,02	8,79	8,72	10,04
Sulawesi Tengah	16,02	14,11	12,86	8,09	8,87	7,87
Sulawesi Selatan	13,97	12,41	13,89	8,71	10,02	9,49
Sulawesi Tenggara	15,18	15,95	17,39	8,82	9,11	10,04
Gorontalo	16,26	19,48	18,09	16,67	18,18	15,39
Sulawesi Barat	8,96	10,03	8,22	2,89	3,51	3,96
Maluku	9,62	9,79	8,98	8,58	8,26	8,55
Maluku Utara	10,55	11,33	10,76	6,60	6,93	5,83
Papua Barat	12,00	12,35	9,58	9,51	9,56	12,54
Papua	6,59	5,93	5,77	7,74	7,18	5,42
Indonesia	14,59	14,93	15,58	10,87	11,13	11,29

Lampiran 12 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013 dan 2014

Provinsi	Formal			Informal		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	42,08	40,72	42,26	57,92	59,28	57,74
Sumatera Utara	39,23	38,83	39,46	60,77	61,17	60,54
Sumatera Barat	41,39	41,99	41,55	58,61	58,01	58,45
Riau	51,47	51,29	52,14	48,53	48,71	47,86
Jambi	44,20	44,84	44,65	55,80	55,16	55,35
Sumatera Selatan	40,12	39,69	40,34	59,88	60,31	59,66
Bengkulu	33,83	35,05	33,96	66,17	64,95	66,04
Lampung	36,07	35,90	36,31	63,93	64,10	63,69
Kep Bangka Belitung	56,34	53,64	56,66	43,66	46,36	43,34
Kepulauan Riau	68,91	67,33	70,32	31,09	32,67	29,68
DKI Jakarta	76,68	76,31	77,38	23,32	23,69	22,62
Jawa Barat	53,28	54,02	53,66	46,72	45,98	46,34
Jawa Tengah	43,68	44,89	44,17	56,32	55,11	55,83
DI Yogyakarta	53,61	55,09	53,94	46,39	44,91	46,06
Jawa Timur	41,69	41,63	42,07	58,31	58,37	57,93
Banten	63,89	66,08	64,70	36,11	33,92	35,30
Bali	52,02	50,29	52,41	47,98	49,71	47,59
Nusa Tenggara Barat	32,85	30,93	33,01	67,15	69,07	66,99
Nusa Tenggara Timur	23,07	21,95	23,21	76,93	78,05	76,79
Kalimantan Barat	38,54	38,47	38,88	61,46	61,53	61,12
Kalimantan Tengah	45,06	46,67	45,63	54,94	53,33	54,37
Kalimantan Selatan	43,71	43,49	44,00	56,29	56,51	56,00
Kalimantan Timur	61,56	63,84	62,00	38,44	36,16	38,00
Sulawesi Utara	43,89	44,49	43,99	56,11	55,51	56,01
Sulawesi Tengah	39,55	40,17	40,03	60,45	59,83	59,97
Sulawesi Selatan	44,87	43,72	45,06	55,13	56,28	54,94
Sulawesi Tenggara	39,14	39,29	39,54	60,86	60,71	60,46
Gorontalo	45,62	44,34	45,78	54,38	55,66	54,22
Sulawesi Barat	30,38	35,14	30,47	69,62	64,86	69,53
Maluku	34,15	35,15	34,37	65,85	64,85	65,63
Maluku Utara	34,92	38,46	35,42	65,08	61,54	64,58
Papua Barat	43,02	41,09	43,25	56,98	58,91	56,75
Papua	21,12	19,90	21,19	78,88	80,10	78,81
Indonesia	46,23	46,41	46,69	53,77	53,59	53,31

Lampiran 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen),
2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,61	8,64	7,98	6,53	7,12	6,75	7,07	7,29	7,15
Sumatera Utara	5,27	7,15	6,06	4,95	7,30	5,95	5,24	7,26	6,10
Sumatera Barat	5,44	6,89	6,03	5,84	7,04	6,32	5,80	6,03	5,89
Riau	4,53	5,37	4,82	4,33	6,27	4,99	4,10	5,74	4,67
Jambi	2,56	2,69	2,61	2,08	3,27	2,50	2,14	2,21	2,16
Sumatera Selatan	4,10	3,79	3,98	4,22	3,25	3,84	3,56	3,26	3,44
Bengkulu	2,59	2,99	2,75	1,63	1,61	1,62	2,25	1,67	2,02
Lampung	3,78	6,87	4,88	4,53	6,05	5,08	3,31	8,01	5,05
Kep. Bangka Belitung	2,04	3,63	2,57	2,85	2,32	2,67	2,70	3,14	2,85
Kepulauan Riau	2,19	7,14	3,88	3,88	8,00	5,26	5,06	8,37	6,17
DKI Jakarta	7,87	9,80	8,60	9,63	10,17	9,84	8,28	10,79	9,26
Jawa Barat	8,14	9,96	8,75	8,51	8,97	8,66	8,52	9,29	8,78
Jawa Tengah	5,85	5,69	5,79	5,66	5,15	5,45	5,58	5,53	5,55
DI Yogyakarta	2,58	3,63	3,06	2,67	1,60	2,16	2,12	0,96	1,59
Jawa Timur	3,27	4,96	3,96	3,98	4,08	4,02	3,87	4,24	4,02
Banten	9,52	8,69	9,23	9,94	9,75	9,87	9,60	9,81	9,67
Bali	2,17	1,28	1,77	1,73	0,95	1,37	1,29	0,86	1,09
Nusa Tenggara Barat	4,80	3,98	4,46	5,52	5,00	5,30	3,83	2,71	3,34
Nusa Tenggara Timur	2,30	3,42	2,80	2,24	1,65	1,97	2,24	1,77	2,03
Kalimantan Barat	2,34	2,25	2,30	2,56	2,49	2,53	2,57	2,17	2,41
Kalimantan Tengah	1,73	3,87	2,52	2,45	3,15	2,71	3,47	3,31	3,42
Kalimantan Selatan	3,37	3,35	3,36	4,01	4,06	4,03	4,02	4,45	4,19
Kalimantan Timur	8,02	7,44	7,83	8,04	10,59	8,89	9,70	7,19	8,91
Sulawesi Utara	4,87	9,67	6,50	4,93	11,85	7,27	5,25	10,57	7,07
Sulawesi Tengah	3,20	2,71	3,01	2,94	2,90	2,92	2,83	3,37	3,04
Sulawesi Selatan	3,88	6,74	4,91	4,92	7,30	5,79	4,78	6,83	5,55
Sulawesi Tenggara	1,85	3,55	2,53	1,94	2,40	2,13	2,59	2,85	2,70
Gorontalo	2,43	4,37	3,17	1,81	3,47	2,44	3,15	2,74	3,00
Sulawesi Barat	1,34	1,63	1,46	1,22	2,15	1,60	0,51	1,62	0,98
Maluku	5,23	9,85	7,12	4,81	9,30	6,59	6,48	6,81	6,61
Maluku Utara	5,14	7,73	6,06	4,00	8,47	5,65	3,93	5,19	4,40
Papua Barat	4,49	4,53	4,51	3,36	4,28	3,70	4,80	3,91	4,48
Papua	3,54	2,88	3,27	3,49	3,48	3,48	4,92	2,77	4,03
Indonesia	5,34	6,21	5,67	5,62	5,84	5,70	5,54	5,90	5,68

Lampiran 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen),
2013 dan 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4,37	4,70	4,34	13,71	10,09	12,08	10,11	7,47	7,79
Sumatera Utara	4,64	4,86	4,64	9,17	8,47	8,56	3,87	4,01	6,84
Sumatera Barat	5,20	4,45	4,99	7,46	10,57	8,35	6,74	5,66	4,50
Riau	2,71	2,39	2,95	6,97	8,33	5,98	8,97	8,32	9,14
Jambi	1,54	1,30	1,23	4,42	5,15	3,61	4,42	2,58	4,40
Sumatera Selatan	1,78	2,31	1,95	8,49	6,72	6,69	7,43	7,45	5,98
Bengkulu	1,37	0,75	0,88	5,31	2,43	3,16	4,50	4,84	5,64
Lampung	3,04	3,80	4,01	9,44	9,37	8,96	6,68	3,46	2,78
Kep. Bangka Belitung	1,33	1,44	1,66	5,88	5,27	4,65	1,63	4,96	6,72
Kepulauan Riau	3,13	3,90	5,90	4,84	8,19	8,88	4,27	3,12	0,00
DKI Jakarta	8,97	11,20	11,80	9,76	11,50	9,10	6,01	4,75	5,47
Jawa Barat	7,69	8,20	8,40	11,62	10,80	11,10	8,18	5,51	4,97
Jawa Tengah	5,16	4,82	5,44	8,47	7,59	6,33	4,57	5,75	4,42
DI Yogyakarta	1,15	0,85	0,16	4,07	3,29	3,92	6,31	3,42	0,55
Jawa Timur	2,84	3,12	3,04	7,59	7,57	7,24	3,50	2,22	3,43
Banten	11,06	12,30	9,76	9,11	9,01	11,74	1,81	1,85	4,24
Bali	0,46	0,21	0,28	2,92	3,24	2,03	5,00	1,86	2,44
Nusa Tenggara Barat	2,15	5,10	2,38	10,18	6,83	6,92	6,96	2,79	2,41
Nusa Tenggara Timur	1,37	1,11	0,86	9,55	4,91	5,80	3,37	5,03	5,44
Kalimantan Barat	1,40	1,38	1,64	5,00	6,67	5,36	4,59	3,22	1,81
Kalimantan Tengah	2,16	2,04	2,52	2,97	3,00	3,63	3,97	6,48	9,32
Kalimantan Selatan	2,79	3,21	2,78	6,08	7,76	8,18	1,93	2,29	6,82
Kalimantan Timur	6,38	8,43	8,52	9,82	10,00	10,49	7,80	7,39	5,92
Sulawesi Utara	4,85	5,38	4,17	8,53	10,26	12,18	9,41	8,31	7,64
Sulawesi Tengah	1,16	1,37	2,25	7,08	6,63	4,92	4,75	3,87	4,11
Sulawesi Selatan	3,50	4,11	4,31	7,16	8,94	8,73	7,00	7,24	5,88
Sulawesi Tenggara	1,05	0,68	0,59	4,45	3,60	4,56	5,31	5,36	7,40
Gorontalo	1,40	1,53	1,78	7,39	5,06	6,38	7,31	4,04	6,78
Sulawesi Barat	0,47	0,52	0,94	2,70	2,91	1,63	6,83	6,97	0,00
Maluku	3,68	3,26	3,22	12,18	10,78	11,49	13,46	13,80	13,19
Maluku Utara	2,62	2,22	2,23	11,14	9,65	8,33	12,10	12,26	6,63
Papua Barat	1,57	1,78	1,34	11,02	6,45	10,59	4,35	6,96	6,69
Papua	1,90	1,72	2,68	6,88	9,17	7,85	9,07	8,55	9,49
Indonesia	4,47	4,75	4,78	8,63	8,42	8,21	5,72	4,72	4,91

Lampiran 15 Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	30,90	38,97	34,41	53,16	47,44	51,81	15,94	13,58	13,78
Sumatera Utara	44,90	47,84	44,96	49,56	45,99	45,06	5,54	6,17	9,98
Sumatera Barat	51,01	41,33	50,07	35,15	46,71	40,69	13,84	11,97	9,24
Riau	31,36	26,91	34,92	47,68	53,81	42,84	20,96	19,28	22,24
Jambi	37,17	31,64	36,77	42,91	55,76	41,08	19,92	12,61	22,15
Sumatera Selatan	29,49	40,18	38,16	55,28	43,75	47,29	15,23	16,07	14,55
Bengkulu	31,28	29,19	27,32	52,80	39,80	40,32	15,91	31,01	32,36
Lampung	42,33	51,00	54,83	47,28	43,49	40,74	10,39	5,51	4,43
Kep Bangka Belitung	34,05	36,22	38,26	61,09	49,83	43,98	4,87	13,95	17,76
Kepulauan Riau	41,27	36,86	46,85	41,32	53,83	53,15	17,41	9,31	0,00
DKI Jakarta	35,16	37,87	44,70	48,24	50,94	42,51	16,60	11,19	12,79
Jawa Barat	57,89	61,98	61,53	34,29	32,73	33,07	7,82	5,29	5,40
Jawa Tengah	65,27	64,45	72,51	29,55	28,63	22,66	5,18	6,92	4,83
DI Yogyakarta	17,78	18,55	4,91	47,78	55,28	89,73	34,44	26,17	5,36
Jawa Timur	49,63	53,40	52,02	42,81	41,56	40,74	7,56	5,03	7,24
Banten	66,51	69,12	54,85	30,91	28,37	39,37	2,57	2,51	5,78
Bali	14,83	8,64	14,23	50,46	76,24	58,27	34,71	15,11	27,50
Nusa Tenggara Barat	32,69	65,49	50,29	54,19	29,95	43,92	13,12	4,56	5,79
Nusa Tenggara Timur	37,73	43,64	32,11	53,90	38,13	46,20	8,37	18,23	21,69
Kalimantan Barat	45,03	40,08	49,37	39,83	50,43	45,29	15,13	9,49	5,34
Kalimantan Tengah	57,52	50,64	49,62	27,44	24,88	24,85	15,04	24,48	25,53
Kalimantan Selatan	59,44	56,95	47,79	35,43	38,09	39,54	5,12	4,96	12,67
Kalimantan Timur	41,06	45,17	48,34	46,35	43,23	43,21	12,59	11,60	8,45
Sulawesi Utara	43,06	42,17	33,71	40,87	45,37	53,60	16,06	12,46	12,69
Sulawesi Tengah	25,00	30,47	50,00	58,70	55,92	37,11	16,30	13,61	12,89
Sulawesi Selatan	43,40	42,84	48,92	37,12	39,51	36,30	19,48	17,65	14,78
Sulawesi Tenggara	24,82	18,62	12,61	46,27	46,55	47,07	28,91	34,83	40,32
Gorontalo	31,02	44,63	44,15	40,54	37,45	36,31	28,44	17,92	19,54
Sulawesi Barat	22,72	22,56	68,44	38,85	38,70	31,56	38,44	38,73	0,00
Maluku	31,69	30,10	29,86	45,07	42,87	47,91	23,24	27,04	22,23
Maluku Utara	26,37	23,18	31,04	46,68	44,81	51,63	26,95	32,01	17,33
Papua Barat	20,60	29,07	17,98	66,07	43,61	61,14	13,33	27,32	20,88
Papua	44,08	37,48	50,80	35,90	44,52	31,05	20,01	18,00	18,15
Indonesia	50,68	53,35	54,08	39,38	38,35	37,36	9,94	8,30	8,56

Lampiran 16 Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	54,82	50,39	50,83	30,88	36,03	36,26	14,31	13,58	12,91
Sumatera Utara	54,20	57,64	57,38	37,80	34,86	34,77	8,00	7,50	7,85
Sumatera Barat	60,61	65,12	65,79	28,17	22,48	23,76	11,21	12,40	10,45
Riau	65,92	66,57	53,54	26,25	27,30	36,92	7,83	6,13	9,54
Jambi	64,14	56,48	63,87	24,50	33,15	23,18	11,36	10,37	12,95
Sumatera Selatan	70,90	67,90	66,71	22,21	25,44	23,76	6,89	6,66	9,53
Bengkulu	68,86	64,77	62,43	25,00	27,79	23,84	6,14	7,44	13,73
Lampung	69,01	70,27	72,54	26,93	24,13	17,89	4,06	5,59	9,57
Kep Bangka Belitung	82,09	75,72	69,60	10,08	19,73	23,50	7,83	4,56	6,90
Kepulauan Riau	64,31	56,59	60,98	34,30	33,45	28,21	1,39	9,96	10,81
DKI Jakarta	51,83	37,68	31,25	33,17	50,45	55,11	15,00	11,87	13,64
Jawa Barat	81,25	79,31	80,99	13,26	13,82	12,54	5,48	6,87	6,47
Jawa Tengah	80,47	79,41	81,86	14,35	15,10	13,99	5,17	5,49	4,15
DI Yogyakarta	47,70	53,90	64,36	36,48	28,20	27,21	15,83	17,90	8,43
Jawa Timur	81,35	79,53	77,33	13,93	15,47	16,98	4,73	5,00	5,69
Banten	77,50	72,01	72,32	17,66	19,76	20,98	4,84	8,23	6,70
Bali	83,73	54,76	62,74	10,90	37,74	31,25	5,38	7,50	6,01
Nusa Tenggara Barat	78,81	70,32	76,09	14,99	20,69	17,37	6,19	8,99	6,54
Nusa Tenggara Timur	81,67	79,95	74,82	14,13	16,73	19,58	4,20	3,32	5,60
Kalimantan Barat	77,50	74,69	78,45	14,46	17,69	16,94	8,04	7,61	4,61
Kalimantan Tengah	60,00	64,63	65,69	34,01	26,61	25,81	5,99	8,76	8,50
Kalimantan Selatan	80,01	80,53	83,55	16,68	15,56	13,06	3,31	3,91	3,39
Kalimantan Timur	51,07	53,79	57,10	36,20	37,28	35,95	12,74	8,92	6,95
Sulawesi Utara	64,92	65,99	57,87	31,71	31,44	31,07	3,37	2,57	11,06
Sulawesi Tengah	71,96	69,73	68,17	20,48	19,17	23,64	7,56	11,10	8,19
Sulawesi Selatan	57,21	51,33	57,43	29,67	32,13	24,22	13,12	16,54	18,35
Sulawesi Tenggara	42,59	51,16	56,61	34,05	30,50	28,07	23,36	18,34	15,32
Gorontalo	81,49	76,67	69,48	16,30	18,91	24,04	2,21	4,41	6,48
Sulawesi Barat	75,43	68,52	70,26	19,51	27,99	27,33	5,06	3,49	2,41
Maluku	66,38	65,03	67,53	27,59	31,15	28,28	6,04	3,82	4,19
Maluku Utara	62,43	67,98	63,51	27,97	24,56	27,02	9,60	7,46	9,47
Papua Barat	68,95	67,82	67,06	22,13	24,60	27,33	8,91	7,58	5,61
Papua	89,27	88,43	86,31	9,20	10,07	12,31	1,53	1,50	1,38
Indonesia	73,37	72,31	72,33	19,86	20,58	20,45	6,77	7,11	7,22

Lampiran 17 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2013 dan 2014

Provinsi	2013	2014	
	November	Februari	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 170	1 154	1 159
Sumatera Utara	2 514	2 498	2 504
Sumatera Barat	1 025	1 043	1 031
Riau	1 343	1 387	1 400
Jambi	780	791	814
Sumatera Selatan	1 695	1 567	1 582
Bengkulu	351	333	350
Lampung	1 671	1 682	1 659
Kep Bangka Belitung	308	318	327
Kepulauan Riau	421	423	418
DKI Jakarta	2 333	2 388	2 230
Jawa Barat	11 600	11 786	11 640
Jawa Tengah	7 038	7 262	7 088
DI Yogyakarta	785	797	831
Jawa Timur	8 822	8 659	8 789
Banten	2 699	2 764	2 712
Bali	681	656	705
Nusa Tenggara Barat	1 081	967	1 002
Nusa Tenggara Timur	902	836	896
Kalimantan Barat	869	912	932
Kalimantan Tengah	464	463	493
Kalimantan Selatan	743	748	790
Kalimantan Timur	893	855	873
Sulawesi Utara	591	594	616
Sulawesi Tengah	593	561	569
Sulawesi Selatan	2 264	2 252	2 181
Sulawesi Tenggara	476	463	474
Gorontalo	258	265	270
Sulawesi Barat	241	243	234
Maluku	350	361	365
Maluku Utara	251	249	248
Papua Barat	181	166	160
Papua	436	408	409
Indonesia	55 830	55 853	55 749

Lampiran 18 Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	16,52	53,70	35,34	17,00	51,92	34,68	16,99	51,87	34,65
Sumatera Utara	14,49	39,59	27,22	14,69	38,89	26,96	14,74	38,80	26,94
Sumatera Barat	14,32	43,15	29,00	14,51	43,78	29,42	15,44	42,01	28,98
Riau	14,61	50,98	32,27	14,43	52,92	33,12	14,67	52,86	33,21
Jambi	14,75	52,49	33,18	15,60	52,25	33,49	16,63	52,83	34,31
Sumatera Selatan	15,53	45,74	30,44	13,80	42,66	28,04	14,84	41,91	28,20
Bengkulu	14,16	40,50	27,09	14,11	37,56	25,62	14,21	39,77	26,76
Lampung	11,36	48,31	29,34	12,30	47,55	29,45	12,76	46,04	28,96
Kep. Bangka Belitung	13,13	53,11	32,25	13,52	54,60	33,16	14,89	54,63	33,89
Kepulauan Riau	12,64	52,66	32,21	11,80	53,45	32,17	10,86	53,22	31,58
DKI Jakarta	14,29	47,55	30,87	14,96	48,15	31,51	13,83	44,96	29,36
Jawa Barat	14,28	56,59	35,21	15,16	56,56	35,64	14,75	55,82	35,06
Jawa Tengah	14,29	41,65	28,23	15,09	42,52	29,07	14,73	41,40	28,32
DI Yogyakarta	19,84	35,44	27,81	22,30	33,76	28,16	20,90	37,26	29,26
Jawa Timur	15,10	44,34	30,08	14,56	43,68	29,48	14,95	44,08	29,87
Banten	14,25	52,29	32,92	15,67	52,06	33,53	14,70	51,41	32,72
Bali	14,90	29,65	22,28	15,22	27,57	21,39	15,61	30,25	22,93
Nusa Tenggara Barat	16,70	47,36	32,85	14,24	42,81	29,29	16,58	42,53	30,25
Nusa Tenggara Timur	18,07	37,72	28,13	17,12	34,40	25,96	18,55	36,44	27,71
Kalimantan Barat	13,88	39,79	26,60	14,85	41,21	27,79	15,24	41,84	28,30
Kalimantan Tengah	12,65	43,48	27,27	12,18	43,58	27,07	12,80	46,21	28,65
Kalimantan Selatan	10,58	43,65	26,99	11,49	42,84	27,05	14,31	42,78	28,44
Kalimantan Timur	13,66	53,45	32,35	13,23	50,57	30,77	11,29	53,76	31,23
Sulawesi Utara	14,17	54,15	33,80	13,96	54,50	33,86	16,08	54,68	35,02
Sulawesi Tengah	14,42	46,11	29,93	13,92	43,09	28,21	13,49	44,08	28,47
Sulawesi Selatan	17,61	57,24	38,29	17,85	56,44	37,98	17,21	54,52	36,68
Sulawesi Tenggara	15,77	43,83	29,90	15,23	42,46	28,95	16,17	42,59	29,47
Gorontalo	16,93	48,90	33,02	17,18	50,11	33,75	17,07	51,24	34,27
Sulawesi Barat	15,11	42,03	28,68	14,98	42,44	28,82	15,50	39,45	27,58
Maluku	19,89	44,71	32,31	19,28	47,01	33,16	19,00	47,74	33,38
Maluku Utara	16,91	51,77	33,98	17,89	49,91	33,57	18,29	48,68	33,17
Papua Barat	18,24	47,07	31,69	15,81	43,99	28,95	13,73	43,77	27,74
Papua	14,04	28,74	20,90	12,59	27,31	19,46	11,61	28,35	19,42
Indonesia	14,70	47,06	30,92	14,96	46,63	30,83	14,95	46,32	30,67

Lampiran 19 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013 dan 2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014	Nov 2013	Feb 2014	Mei 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	56,46	55,98	56,66	30,95	31,75	30,68	12,59	12,28	12,66
Sumatera Utara	58,57	58,55	59,03	32,76	32,30	32,09	8,67	9,14	8,88
Sumatera Barat	59,20	58,71	59,16	28,41	27,93	28,74	12,39	13,36	12,10
Riau	55,74	56,17	55,24	33,00	32,26	33,41	11,26	11,56	11,35
Jambi	62,98	60,69	64,49	25,29	27,09	24,62	11,73	12,21	10,89
Sumatera Selatan	65,95	66,73	67,29	25,90	24,99	24,33	8,16	8,28	8,38
Bengkulu	62,90	63,05	62,65	27,37	26,56	25,76	9,73	10,38	11,59
Lampung	67,95	68,30	69,00	24,45	23,59	22,95	7,60	8,11	8,05
Kep. Bangka Belitung	65,68	67,21	65,57	26,66	25,27	26,92	7,66	7,52	7,51
Kepulauan Riau	51,10	49,68	48,95	33,09	34,59	36,89	15,81	15,73	14,16
DKI Jakarta	33,71	33,27	35,08	42,52	43,58	43,26	23,76	23,14	21,66
Jawa Barat	65,82	65,43	64,30	25,82	26,25	26,16	8,36	8,32	9,54
Jawa Tengah	73,24	72,89	74,07	20,20	20,56	19,87	6,56	6,55	6,06
DI Yogyakarta	47,34	47,13	47,98	35,95	36,30	36,50	16,71	16,56	15,52
Jawa Timur	69,13	68,83	68,88	22,32	22,07	22,64	8,55	9,09	8,48
Banten	55,53	55,51	54,37	31,32	31,09	32,43	13,15	13,40	13,20
Bali	57,17	56,67	56,23	30,54	32,20	31,43	12,29	11,13	12,34
Nusa Tenggara Barat	67,86	68,10	70,76	23,73	23,24	21,20	8,41	8,66	8,04
Nusa Tenggara Timur	77,25	77,57	75,78	15,79	15,30	16,14	6,95	7,14	8,08
Kalimantan Barat	74,05	73,44	72,51	18,35	19,11	20,37	7,60	7,45	7,12
Kalimantan Tengah	67,17	67,30	67,28	23,28	22,48	23,37	9,56	10,22	9,35
Kalimantan Selatan	71,53	71,50	71,95	19,57	19,77	20,26	8,90	8,73	7,79
Kalimantan Timur	50,41	47,61	50,57	36,96	38,43	36,71	12,63	13,96	12,72
Sulawesi Utara	57,76	56,99	57,14	31,14	32,11	31,12	11,10	10,90	11,74
Sulawesi Tengah	64,68	65,07	67,55	24,98	24,65	22,91	10,34	10,27	9,54
Sulawesi Selatan	60,86	60,29	62,99	25,48	25,59	23,07	13,67	14,12	13,94
Sulawesi Tenggara	59,86	58,65	57,44	26,34	27,54	27,87	13,80	13,82	14,69
Gorontalo	70,28	71,12	74,29	17,38	18,05	17,07	12,34	10,83	8,64
Sulawesi Barat	70,82	69,91	71,28	20,97	21,21	18,95	8,20	8,88	9,77
Maluku	61,37	60,85	61,30	26,33	26,23	27,56	12,29	12,92	11,14
Maluku Utara	61,07	59,01	61,19	25,42	26,24	27,29	13,51	14,75	11,52
Papua Barat	59,16	60,47	60,16	27,03	25,01	25,86	13,81	14,51	13,98
Papua	75,76	75,76	76,37	17,03	16,91	15,93	7,21	7,33	7,70
Indonesia	64,26	63,99	64,25	25,87	25,98	25,85	9,86	10,03	9,90

Lampiran 20 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2013 dan 2014

Lapangan Usaha	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 396 016	928 171	1 299 491	1 319 035	820 542	1 225 675	1 379 389	878 224	1 273 151
2	3 253 252	2 512 405	3 214 075	3 114 981	2 907 368	3 099 772	3 438 927	2 800 910	3 398 410
3	1 874 920	1 247 769	1 648 486	1 811 330	1 205 595	1 593 805	1 794 620	1 388 258	1 650 776
4	2 445 774	1 678 367	2 347 584	2 452 028	2 331 811	2 441 991	2 733 693	2 192 568	2 676 825
5	1 737 716	1 978 018	1 744 505	1 788 546	2 007 305	1 797 004	1 944 756	2 298 100	1 957 179
6	1 664 496	1 327 849	1 535 094	1 604 160	1 178 644	1 437 260	1 617 979	1 294 271	1 493 273
7	2 313 726	2 361 518	2 318 860	2 217 898	2 194 993	2 215 624	2 201 987	2 317 935	2 213 072
8	2 930 486	2 708 211	2 863 283	2 765 632	2 747 162	2 760 118	2 757 724	2 667 658	2 730 280
9	2 541 036	1 809 910	2 190 700	2 533 164	1 750 155	2 153 079	2 472 740	1 802 697	2 148 803
Total	2 110 503	1 610 684	1 936 921	2 065 294	1 551 915	1 885 815	2 072 480	1 636 990	1 921 379

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2013 dan 2014

Lapangan Usaha	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 547 590	1 218 351	1 299 491	1 472 630	1 145 669	1 225 675	1 585 591	1 167 733	1 273 151
2	4 135 338	2 152 920	3 214 075	4 112 825	1 900 052	3 099 772	4 512 398	2 000 231	3 398 410
3	1 790 684	1 264 789	1 648 486	1 719 890	1 258 490	1 593 805	1 821 056	1 252 585	1 650 776
4	2 748 458	1 462 327	2 347 584	2 885 854	1 648 699	2 441 991	3 012 521	1 802 734	2 676 825
5	1 932 246	1 421 394	1 744 505	1 993 979	1 441 285	1 797 004	2 062 147	1 749 026	1 957 179
6	1 653 756	1 075 533	1 535 094	1 540 016	1 063 004	1 437 260	1 594 449	1 115 726	1 493 273
7	2 550 541	1 591 934	2 318 860	2 485 679	1 539 916	2 215 624	2 439 010	1 560 256	2 213 072
8	3 072 481	1 719 401	2 863 283	2 992 418	1 623 274	2 760 118	2 980 942	1 530 596	2 730 280
9	2 380 874	1 742 889	2 190 700	2 308 551	1 790 794	2 153 079	2 312 151	1 763 223	2 148 803
Total	2 150 111	1 460 704	1 936 921	2 083 499	1 451 969	1 885 815	2 132 360	1 465 986	1 921 379

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 689 067	2 114 199	1 830 632	1 806 821	1 576 408	1 731 183	1 764 450	1 607 926	1 709 621
Sumatera Utara	1 750 799	1 636 505	1 713 219	1 750 767	1 534 584	1 676 004	1 803 707	1 593 707	1 733 225
Sumatera Barat	2 020 001	1 689 190	1 885 696	1 939 195	1 795 816	1 881 098	1 944 946	1 740 329	1 860 936
Riau	2 185 684	1 757 004	2 056 208	2 187 134	2 002 132	2 134 079	2 223 320	1 815 456	2 104 558
Jambi	2 019 994	1 504 208	1 856 211	1 884 525	1 503 491	1 764 244	1 818 620	1 479 970	1 705 531
Sumatera Selatan	1 757 441	1 519 615	1 681 200	1 753 307	1 282 414	1 596 162	1 837 138	1 217 954	1 627 107
Bengkulu	2 102 469	1 641 981	1 920 241	2 064 465	1 578 290	1 867 602	2 002 052	1 615 820	1 847 633
Lampung	1 578 712	1 382 713	1 508 410	1 693 333	1 326 362	1 564 318	1 571 193	1 376 345	1 502 597
Kep. Bangka Belitung	1 991 300	1 581 393	1 862 818	2 087 042	1 566 615	1 933 808	2 103 826	1 644 223	1 968 291
Kepulauan Riau	2 735 452	2 502 164	2 663 313	2 828 017	2 561 745	2 744 863	3 125 901	2 591 466	2 953 084
DKI Jakarta	3 410 285	2 620 359	3 114 110	3 170 590	2 384 748	2 871 802	3 142 573	2 505 745	2 907 645
Jawa Barat	2 068 555	1 518 462	1 903 061	2 070 636	1 515 986	1 900 760	2 018 013	1 727 965	1 930 804
Jawa Tengah	1 561 922	1 104 665	1 378 291	1 557 914	1 109 196	1 378 134	1 561 117	1 108 104	1 379 964
DI Yogyakarta	1 804 141	1 426 826	1 643 355	1 896 435	1 446 697	1 690 938	1 908 270	1 458 730	1 712 148
Jawa Timur	1 720 335	1 284 567	1 554 598	1 673 407	1 196 316	1 490 826	1 703 185	1 317 765	1 559 219
Banten	2 917 798	2 130 247	2 653 642	2 571 199	1 943 546	2 366 672	2 599 126	2 094 493	2 430 525
Bali	2 022 427	1 614 841	1 864 121	2 086 253	1 588 813	1 883 179	2 051 238	1 586 824	1 870 524
Nusa Tenggara Barat	1 879 704	1 299 947	1 659 241	1 808 685	1 469 797	1 692 031	1 691 902	1 371 323	1 580 915
Nusa Tenggara Timur	1 761 682	1 662 375	1 729 642	1 841 382	1 678 586	1 784 355	1 817 291	1 908 377	1 850 099
Kalimantan Barat	1 867 943	1 537 606	1 778 094	1 931 814	1 577 399	1 831 499	1 963 059	1 706 071	1 889 693
Kalimantan Tengah	2 255 864	1 776 940	2 115 727	2 177 724	1 794 736	2 065 872	2 250 813	1 866 866	2 137 804
Kalimantan Selatan	2 506 283	1 651 280	2 260 043	2 444 596	1 411 412	2 149 149	2 338 509	1 471 725	2 097 715
Kalimantan Timur	3 108 460	2 270 138	2 879 787	3 090 285	2 139 938	2 823 438	3 043 511	2 205 974	2 820 003
Sulawesi Utara	2 079 329	2 155 354	2 104 721	1 906 266	2 410 320	2 077 495	2 035 988	2 144 224	2 074 617
Sulawesi Tengah	2 065 488	1 540 264	1 870 895	1 985 523	1 548 577	1 831 205	1 953 651	1 566 804	1 812 647
Sulawesi Selatan	1 976 164	1 494 906	1 796 007	2 078 912	1 561 014	1 887 418	2 121 783	1 641 278	1 943 289
Sulawesi Tenggara	2 252 263	1 654 096	2 033 843	2 193 690	1 700 497	2 017 945	2 341 192	1 646 005	2 077 276
Gorontalo	1 768 843	1 653 778	1 716 285	1 624 520	1 583 986	1 606 871	1 843 794	1 553 705	1 716 614
Sulawesi Barat	1 647 948	1 243 559	1 510 110	1 843 822	1 568 252	1 749 757	1 739 968	1 687 273	1 719 558
Maluku	2 228 036	1 795 803	2 070 155	2 116 910	1 886 466	2 036 042	2 428 048	2 081 291	2 307 881
Maluku Utara	1 980 353	2 238 238	2 056 927	2 041 210	2 109 350	2 061 758	2 201 191	1 996 647	2 137 883
Papua Barat	2 823 735	2 391 832	2 699 870	3 004 801	1 988 494	2 729 619	2 864 795	2 232 416	2 687 843
Papua	3 184 008	2 501 291	3 013 492	2 978 830	2 465 210	2 847 628	3 307 831	2 648 836	3 128 189
Indonesia	2 110 503	1 610 684	1 936 921	2 065 294	1 551 915	1 885 815	2 072 480	1 636 990	1 921 379

Lampiran 23 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2013 dan 2014

Provinsi	November 2013			Februari 2014			Mei 2014		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 296 804	1 511 845	1 830 632	2 062 616	1 510 909	1 731 183	2 116 421	1 455 339	1 709 621
Sumatera Utara	1 838 039	1 433 979	1 713 219	1 763 002	1 475 881	1 676 004	1 809 589	1 552 530	1 733 225
Sumatera Barat	2 126 496	1 590 534	1 885 696	2 077 620	1 640 093	1 881 098	2 079 700	1 618 774	1 860 936
Riau	2 308 041	1 759 418	2 056 208	2 465 641	1 742 852	2 134 079	2 521 071	1 628 989	2 104 558
Jambi	2 257 426	1 618 616	1 856 211	2 189 906	1 491 377	1 764 244	2 157 750	1 434 929	1 705 531
Sumatera Selatan	1 843 377	1 497 997	1 681 200	1 826 174	1 360 969	1 596 162	1 807 960	1 463 556	1 627 107
Bengkulu	2 384 246	1 424 365	1 920 241	2 192 171	1 535 217	1 867 602	2 186 922	1 498 063	1 847 633
Lampung	1 845 883	1 268 838	1 508 410	2 022 925	1 225 356	1 564 318	2 036 765	1 144 165	1 502 597
Kep. Bangka Belitung	1 929 395	1 776 128	1 862 818	2 095 350	1 700 805	1 933 808	2 220 780	1 541 163	1 968 291
Kepulauan Riau	2 685 533	2 443 013	2 663 313	2 838 138	1 844 900	2 744 863	2 986 399	2 652 550	2 953 084
DKI Jakarta	3 114 110	-	3 114 110	2 871 802	-	2 871 802	2 907 645	-	2 907 645
Jawa Barat	2 030 892	1 351 172	1 903 061	2 022 626	1 386 039	1 900 760	2 060 880	1 402 236	1 930 804
Jawa Tengah	1 510 440	1 153 732	1 378 291	1 467 970	1 240 351	1 378 134	1 391 494	1 361 297	1 379 964
DI Yogyakarta	1 669 243	1 557 404	1 643 355	1 773 427	1 419 393	1 690 938	1 784 411	1 472 610	1 712 148
Jawa Timur	1 737 971	1 192 496	1 554 598	1 651 212	1 152 983	1 490 826	1 796 604	1 103 386	1 559 219
Banten	2 854 730	1 571 716	2 653 642	2 540 565	1 536 380	2 366 672	2 622 807	1 521 617	2 430 525
Bali	1 968 059	1 577 442	1 864 121	1 982 494	1 631 901	1 883 179	1 979 342	1 606 685	1 870 524
Nusa Tenggara Barat	1 831 390	1 390 817	1 659 241	1 927 643	1 320 942	1 692 031	1 678 305	1 416 627	1 580 915
Nusa Tenggara Timur	2 078 141	1 452 943	1 729 642	2 202 896	1 448 533	1 784 355	2 058 528	1 693 818	1 850 099
Kalimantan Barat	1 998 613	1 566 815	1 778 094	2 054 009	1 614 026	1 831 499	2 241 907	1 589 008	1 889 693
Kalimantan Tengah	2 366 164	1 948 967	2 115 727	2 222 622	1 967 142	2 065 872	2 287 906	2 034 861	2 137 804
Kalimantan Selatan	2 212 549	2 327 610	2 260 043	2 184 921	2 100 019	2 149 149	2 286 386	1 849 109	2 097 715
Kalimantan Timur	2 971 282	2 632 277	2 879 787	3 075 879	2 171 259	2 823 438	3 135 076	2 075 337	2 820 003
Sulawesi Utara	2 202 545	1 947 580	2 104 721	2 249 806	1 772 864	2 077 495	2 247 165	1 821 901	2 074 617
Sulawesi Tengah	2 450 764	1 480 648	1 870 895	2 224 630	1 561 568	1 831 205	2 038 552	1 625 460	1 812 647
Sulawesi Selatan	2 096 058	1 424 269	1 796 007	2 156 733	1 524 952	1 887 418	2 204 035	1 609 499	1 943 289
Sulawesi Tenggara	2 192 680	1 874 099	2 033 843	2 301 083	1 726 920	2 017 945	2 313 482	1 821 614	2 077 276
Gorontalo	2 065 069	1 329 674	1 716 285	1 862 167	1 347 513	1 606 871	2 141 942	1 205 664	1 716 614
Sulawesi Barat	1 928 924	1 210 240	1 510 110	2 032 646	1 581 976	1 749 757	2 475 441	1 094 444	1 719 558
Maluku	2 308 052	1 703 441	2 070 155	2 247 200	1 714 500	2 036 042	2 352 229	2 245 546	2 307 881
Maluku Utara	2 110 507	2 011 051	2 056 927	2 278 030	1 916 359	2 061 758	2 058 483	2 202 194	2 137 883
Papua Barat	2 601 341	2 786 273	2 699 870	2 747 086	2 714 311	2 729 619	2 917 403	2 505 915	2 687 843
Papua	3 356 835	2 382 964	3 013 492	3 033 472	2 510 532	2 847 628	3 369 328	2 626 617	3 128 189
Indonesia	2 150 111	1 460 704	1 936 921	2 083 499	1 451 969	1 885 815	2 132 360	1 465 986	1 921 379

Lampiran 24 Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal dan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tingkat Profesional	Tingkat Kepunahan	Rejebit Relesan dan/ata Usaha	Tingkat Rajukan	Tingkat Usaha/ka	Tingkat Usaha Retarian	Tingkat Partisi	Tingkat Operasional	Tingkat Keer	Lainya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Buahan Sathi	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Buahan Dibantu/ Buahan Tidak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Buahan Dibantu/ Buahan Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buahan/ Karyawan/ Regwa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rejebit/ Bhasid/ Retarian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Rejebit/ Bhasid/ Noputarian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Rejebit/ Kélagu/ tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Kegiatan F=Formal INF=Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

